

**PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN DALAM
KAMPANYE PUBLIK TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI
PADA PEMILU 2024 DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Sosial (S.Sos.)

Disusun Oleh:

MOH Frendi Agus Wijaya

22105040024

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-847/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024 DI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. FRENDI AGUS WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22105040024
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mahatva Yoga Adi Pridana, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a211e673ebd5



Penguji II

Erham Budi Wiranto, S.Th.L., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a212405ee52b



Penguji III

Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
SIGNED

Valid ID: 6a22262906a4



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a225add3aed6

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOH Frendi Agus Wijaya
NIM : 22105040024
Judul Skripsi : PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN
DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP
KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024
DI YOGYAKARTA

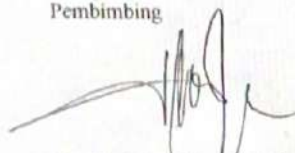
Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Sosiologi Agama.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Mengetahui:
Pembimbing



Dr. Mahatya Yoga Adi Pradana, M.Sos
NIP. 19901210201903011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOH Frendi Agus Wijaya
NIM : 22105040024
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Sosiologi Agama
Alamat : RT/RW 001/008 Mayang, Magersari, KEC Plumpang,
Kab Tuban Jawa Timur
Telp/Hp : 088217061263
Judul Skripsi : PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN
DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP
KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU
2024 DI YOGYAKARTA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



MOH Frendi Agus Wijaya
NIM: 22105040024

NOTA DINAS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing: Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos

Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi sdr MOH Frendi Agus Wijaya

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOH Frendi Agus Wijaya
NIM : 22105040024
Judul Skripsi : PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024 DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Sos) di Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Mengenal

Pembimbing:

Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.

NIP. 19901210201903011.

MOTTO

مَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ أَمْسِيهِ فَهُوَ رَابِحٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِيهِ فَهُوَ مَعْبُودٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِيهِ فَهُوَ مُلْعُونٌ

"Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka."

"Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning." #Benjamin Franklin

"Tanpa pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan, kata-kata seperti perbaikan, pencapaian, dan kesuksesan tidak akan memiliki arti."

"Anglaras Ilining Banyu, Angeli Ananging Ora Keli"

#SunanKalijogo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segenap usaha dan doa. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kebanggaan yang tak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibu Suhartik dan Bapak Sudarminto serta adik saya Reasha Aqilla Azkayra. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Dukungan moril maupun materi, kesabaran dalam mendampingi di saat suka maupun duka, serta kepercayaan yang selalu diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Segala capaian yang penulis raih tidak terlepas dari peran, doa, dan keikhlasan kedua orang tua yang senantiasa menjadi tempat pulang, sumber motivasi, dan teladan terbaik dalam menjalani kehidupan.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa hadir dengan kehangatan, doa, dan dukungan yang tidak pernah surut. Kebersamaan dan kasih sayang keluarga menjadi pelita yang menerangi perjalanan penulis, khususnya di saat-saat terberat dalam proses penyelesaian studi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan pengorbanan keluarga dengan berlipat ganda kebaikan dan keberkahan.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan koreksi yang diberikan menjadi penguat dan penerang langkah penulis dalam menghadapi berbagai kendala, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendedikasikan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai akademik dan kehidupan selama masa perkuliahan. Ilmu yang diberikan akan senantiasa penulis jaga dan amalkan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.

Terakhir, persembahan ini penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah menemani, menguatkan, dan mengisi hari-hari perkuliahan dengan kenangan yang begitu berharga. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat, bantuan, canda tawa, dan kebersamaan yang tulus selama menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis, dan persahabatan ini semoga senantiasa terjaga hingga kapanpun. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh keberkahan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana (S1) serta memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Namun, dengan adanya doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan kelembagaan serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Ketua Program Studi Sosiologi Agama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran, beliau senantiasa memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini secara lebih terarah dan sistematis. Peran beliau tidak hanya membantu dalam aspek akademik, tetapi juga memberikan dorongan semangat yang besar dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan ikhlas mendedikasikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta nilai-nilai kehidupan kepada penulis selama masa perkuliahan. Melalui proses pembelajaran, diskusi, dan bimbingan yang diberikan, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai kajian sosial dan keagamaan yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan ke depan.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sudarminto dan Ibu Suhartik, yang senantiasa hadir dengan doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta

dukungan moril dan materi yang tak terhingga. Kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan yang selalu diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Raesha Aqilla Azkayra, adik tersayang, yang dengan kehadiran, perhatian, dan keceriaan yang diberikan turut menghadirkan semangat dan kebahagiaan bagi penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Keluarga adalah tempat pulang sekaligus sumber kekuatan terbesar yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga tahap ini.

6. Kepada teman-teman seangkatan Program Studi Sosiologi Agama angkatan 2022, atas segala kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah mewarnai perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat seperjuangan di manapun berada, yang telah menemani, menguatkan, dan mengisi hari-hari penulis dengan kenangan yang tak terlupakan. Kehadiran kalian menjadi warna dan semangat tersendiri dalam perjalanan akademik ini, dan persahabatan yang terjalin semoga senantiasa terjaga selamanya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama dan perilaku politik di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, Juni 2026
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penulis,

MOH Frendi Agus Wijaya
22105040024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini lahir dari maraknya fenomena keterlibatan kyai dan tokoh agama dalam kampanye elektoral, termasuk praktik sowan politik oleh kandidat ke pesantren, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana otoritas kharismatik kiai dapat mempengaruhi pilihan politik santri sebagai pemilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Sampel terdiri dari 175 santri aktif yang tersebar di berbagai pondok pesantren di DIY dan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert dengan 48 butir pernyataan yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis yang digunakan meliputi regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji efek moderasi tiga variabel: literasi politik santri (Z1), orientasi pesantren (Z2), dan literasi media digital (Z3).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara otoritas tokoh keagamaan dan kampanye publik secara simultan terhadap keputusan memilih santri (F signifikan, $p < 0,001$; $R^2 = 0,579$), yang berarti kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 57,9% variasi keputusan memilih santri. (2) Secara parsial, kampanye publik tokoh keagamaan (X2) merupakan prediktor dominan dengan koefisien regresi $b = 0,622$ ($t = 12,820$, $p < 0,001$), sementara otoritas tokoh keagamaan (X1) tidak signifikan secara parsial ($b = 0,089$, $p = 0,068$), yang mengindikasikan bahwa pengaruh otoritas dimediasi oleh tindakan kampanye publik. (3) Dari analisis MRA, ditemukan empat efek moderasi yang signifikan: orientasi pesantren (Z2) memperkuat pengaruh X1 ($p < 0,001$) dan X2 ($p = 0,017$) terhadap keputusan memilih; sementara literasi politik (Z1) memperlemah pengaruh X2 ($p = 0,048$) dan literasi media digital (Z3) memperlemah pengaruh X2 secara paling kuat ($p < 0,001$). Model komprehensif dengan variabel moderating mencapai $R^2 = 0,729$, menjelaskan 72,9% variasi keputusan memilih santri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampanye publik tokoh keagamaan adalah mekanisme transmisi utama pengaruh elektoral kyai terhadap santri, sementara lingkungan pesantren yang berorientasi politik aktif memperkuat pengaruh tersebut dan literasi media digital santri menjadi perisai epistemis yang efektif untuk mereduksinya. Temuan ini memberikan implikasi teoritis bagi pengembangan studi sosiologi agama dan perilaku politik di Indonesia, sekaligus implikasi praktis bagi upaya penguatan literasi politik dan media digital di lingkungan pesantren demi mendorong partisipasi elektoral santri yang lebih otonom dan kritis.

Kata Kunci: Otoritas Tokoh Keagamaan, Kampanye Publik, Keputusan Memilih Santri, Literasi Politik, Orientasi Pesantren, Literasi Media Digital, Pemilu 2024, Yogyakarta.

ABSTRACT

This study examines the influence of religious figures' authority in public campaigns on the voting decisions of santri (Islamic boarding school students) in the 2024 General Election in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research is motivated by the widespread phenomenon of kyai (Islamic clerics) and religious figures' involvement in electoral campaigns, including the sowan politik practice — political visits by candidates to pesantren (Islamic boarding schools) — which raises questions about the extent to which the kyai's charismatic authority can influence santri's political choices as voters.

This study employed a quantitative approach with a survey design. The sample consisted of 175 active santri from various pesantren across DIY who had the right to vote in the 2024 General Election. Data were collected using a Likert-scale questionnaire comprising 48 items, all of which had been validated for reliability and validity. Analytical techniques included multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) to test the moderating effects of three variables: santri's political literacy (Z1), pesantren orientation (Z2), and digital media literacy (Z3).

The results reveal that: (1) There is a significant simultaneous influence of religious figures' authority and public campaigns on santri's voting decisions (F significant, $p < .001$; $R^2 = .579$), indicating that these two variables jointly explain 57.9% of the variance in santri's voting decisions. (2) Partially, the public campaign variable (X2) emerged as the dominant predictor with a regression coefficient of $b = .622$ ($t = 12.820$, $p < .001$), whereas religious authority (X1) was not significant on a partial basis ($b = .089$, $p = .068$), suggesting that the influence of authority is mediated through the act of public campaigning. (3) MRA revealed four significant moderation effects: pesantren orientation (Z2) amplified the influence of both X1 ($p < .001$) and X2 ($p = .017$) on voting decisions; while political literacy (Z1) weakened the influence of X2 ($p = .048$) and digital media literacy (Z3) most strongly weakened the influence of X2 ($p < .001$). The comprehensive model including moderating variables achieved $R^2 = .729$, explaining 72.9% of the variance in santri's voting decisions.

This study concludes that the public campaign activities of religious figures constitute the primary electoral transmission mechanism of the kyai's influence over santri, while a politically active pesantren environment amplifies this influence and santri's digital media literacy serves as an effective epistemic shield that reduces it. These findings carry theoretical implications for the development of sociology of religion and political behavior studies in Indonesia, as well as practical implications for efforts to strengthen political and digital media literacy in pesantren environments in order to foster a more autonomous and critically engaged electoral participation among santri.

Keywords: Religious Figures' Authority, Public Campaign, Santri's Voting Decisions, Political Literacy, Pesantren Orientation, Digital Media Literacy, 2024 General Election, Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	III
NOTA DINAS.....	IV
MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR DIAGRAM	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
D. TINJAUAN PUSTAKA	14
E. KERANGKA TEORI	17
1. Otoritas Tokoh Keagamaan.....	17
2. Kampanye Publik Tokoh Agama	18
3. Perilaku Keputusan dalam Memilih Santri	19
4. Faktor-Faktor Moderating santri dalam pilihan politik.....	20
F. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK.....	20
G. HIPOTESIS	22
H. METODOLOGI PENELITIAN.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Variabel penelitian	22
3. Definisi Operasional	27
4. Lokasi Penelitian.....	29
5. Populasi dan Sampel Penelitian	30
6. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	31
7. Teknik Analisis Data	35
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	44
BAB II	45
A. GAMBARAN UMUM.....	45
B. DINAMIKA SANTRI D.I. YOGYAKARTA	47
C. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
D. KARAKTERISTIK RESPONDEN	52
BAB III.....	59
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. UJI INSTRUMEN	59
1. Uji Validitas	59

2.	<i>Uji Reliabilitas</i>	59
B.	ANALISIS DESKRIPTIF PENELITIAN	61
1.	<i>Analisis Data Penelitian</i>	61
2.	<i>Analisis Deskriptif Variabel Penelitian</i>	61
C.	UJI ASUMSI CLASSIC	62
1.	<i>Uji Normalitas</i>	62
2.	<i>Uji Multikolinearitas</i>	64
3.	<i>Uji Heteroskedastisitas</i>	65
4.	<i>Uji Lineartitas</i>	66
D.	ANALISIS HUBUNGAN DAN PENGARUH VARIABEL	66
1.	<i>Uji Koefisien Korelasi</i>	67
2.	<i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	69
E.	PENGUJIAN HIPOTESIS	70
1.	<i>Uji T Parsial</i>	70
2.	<i>Uji F Simultan</i>	71
3.	<i>Koefisien Determinasi</i>	71
4.	<i>Uji Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	72
BAB IV	76
PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN	76
A.	PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	76
B.	BESARAN PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN DALAM KAMPANYE PUBLIK TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	82
C.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMODERASI PENGARUH OTORITAS TOKOH KEAGAMAAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH SANTRI PADA PEMILU 2024 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	86
D.	PEMBAHASAN TERINTEGRASI: MODEL PENGARUH TOKOH KEAGAMAAN DALAM PERILAKU ELEKTORAL SANTRI	92
E.	KONFIRMASI PENGUJIAN HIPOTESIS	95
F.	REFLEKSI AKADEMIS DAN KETERBATASAN PENELITIAN	96
BAB V	98
PENUTUP	98
1.	KESIMPULAN	98
2.	SARAN	100
3.	KATA PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112
CURRICULUM VITAE	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	28
Tabel 2.1 Karakteristik Demografis Responden Penelitian (N=175)	53
Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel Penelitian	59
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Seluruh Variabel Penelitian (N=175)	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk per Variabel	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas (Collinearity Statistics)	64
Tabel 4.5 Matriks Korelasi Pearson Antar Variabel Utama	67
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.7 Hasil Uji T Parsial	69
Tabel 4.8 Hasil Uji F Simultan	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
Tabel 4.10 Hasil Uji MRA – Koefisien Model Penuh	72
Tabel 4.11 Hasil Moderation Estimates (Analisis Moderasi per Pasangan Variabel)	72
Tabel 4.12 Rekap Konfirmasi Seluruh Hipotesis Penelitian	94
Tabel 5.1 Rekap Kesimpulan dan Saran Berdasarkan Temuan Penelitian	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Q-Q Plot Residual Model Regresi	63
Gambar 4.2 Diagram Model Hubungan dan Pengaruh Antar Variabel Penelitian	66



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Hasil Karakteristik Usia Responden	53
Diagram 1.2 Karakteristik Pondok Pesantren (Afiliasi Aliran Keagamaan)	54
Diagram 1.3 Jenis Pesantren	55
Diagram 1.4 Status di Pesantren Saat Ini	55
Diagram 1.5 Status Mondok Formal Saat Ini	56
Diagram 1.6 Pendidikan Santri	57
Diagram 1.7 Lama Mondok	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan bentuk adanya momentum penting dalam konsolidasi demokrasi, yang mana keikutsertaan masyarakat diuji dalam konteks polarisasi politik yang semakin kompleks. Dalam dinamika ektoral tersebut, muncul fenomena signifikan terkait keterlibatan tokoh keagamaan dalam proses kampanye publik yang dapat mempengaruhi dan ditujukan untuk mempengaruhi preferensi pilihan publik, khususnya dikalangan masyarakat keagamaan dan kalangan santri. Tokoh keagamaan, yang secara tradisional memiliki otoritas spiritual dan moral dalam komunitas masyarakat keagamaan dan juga dalam komunitas pesantren, semakin aktif terlibat dalam proses politik dengan memberikan arahan, dukungan eksplisit, serta legitimasi religius kepada kandidat maupun partai politik tertentu. Fenomena ini terjadi melalui ceramah keagamaan dan praktik "sowan politik" (kunjungan elit politik kepada tokoh agama untuk meminta dukungan), yang dipersepsikan santri sebagai dukungan religius. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transformasi otoritas keagamaan menjadi alat mobilisasi politik dan pengaruhnya terhadap pilihan politik santri yang memiliki hubungan patron-klien dengan kyai atau ustadz.¹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tradisional di Indonesia memiliki keunikan sendiri dalam hal struktur sosial dan otoritas. Pesantren memiliki struktur sosial yang khas, di mana kyai berperan sentral tidak hanya sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai figur yang memiliki otoritas kharismatik dan moral. Hubungan kyai-santri dibangun atas kepercayaan mendalam bahwa kyai memiliki pengetahuan religius dan kebijaksanaan spiritual yang dapat membimbing kehidupan santri, baik dalam urusan agama maupun dunia. Budaya "*sami'na wa atha'na*" (mendengar dan taat) dan "*manut dawuhe kyai*" yang kuat di pesantren menciptakan pola hubungan hierarkis, sehingga arahan kyai cenderung diterima tanpa banyak pertanyaan. Dalam ranah politik, pola ini membuat santri cenderung mengikuti preferensi politik kyai mereka, dengan keyakinan bahwa pilihan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan komunitas santri sebagai segmen pemilih strategis, karena mobilisasi politik dapat dilakukan secara efektif melalui jalur otoritas keagamaan.²

¹ Susanto Susanto, Emy Hajar Abra, and Alwan Hadiyanto, "Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia", *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3 (2025), pp. 1506–18.

² Eko Setiawan, "EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 2 (2012), pp. 137–52.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki konteks sosial-politik dan keagamaan yang unik dalam kontestasi politik di Indonesia. Sebagai wilayah dengan populasi santri besar dan tradisi pesantren yang kuat, DIY menjadi arena penting bagi mobilisasi politik berbasis keagamaan. Namun, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan tinggi yang mempertemukan berbagai tradisi intelektual, mulai dari tradisi kritis akademik hingga tradisi keagamaan pesantren. Heterogenitas ini menciptakan dinamika menarik: santri di Yogyakarta tidak hanya terpapar pada otoritas tokoh keagamaan tradisional, tetapi juga pada sumber informasi alternatif melalui media digital, diskursus akademik, dan interaksi sosial yang plural. Selain itu, keberadaan Keraton dengan Sultan Hamengkubuwono X sebagai figur otoritas kultural-politik menambah kompleksitas, di mana otoritas keagamaan berinteraksi dengan otoritas tradisional Jawa dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Konteks inilah yang menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi strategis untuk memahami dinamika pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri dalam situasi pluralitas sosial dan intelektual.³

Fenomena keterlibatan tokoh keagamaan dalam kampanye publik pada pemilu 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator empiris. Sejumlah tokoh keagamaan tergabung dalam kampanye nasional kandidat tertentu, memberikan pengajian, ceramah, dan doa, bahkan mengeluarkan pernyataan secara eksplisit maupun implisit mendukung calon kandidat tertentu. Praktik "sowan politik" oleh kandidat presiden, wakil presiden, maupun caleg ke berbagai pondok pesantren dan tokoh keagamaan menjadi strategi kampanye yang lumrah, di mana kunjungan tersebut kemudian dipublikasikan secara luas melalui media massa dan media sosial untuk membangun citra kedekatan dengan komunitas keagamaan. Di kalangan santri, arahan politik dari kyai atau tokoh keagamaan menjadi referensi penting dalam menentukan pilihan politik, dengan argumentasi bahwa tokoh keagamaan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat membedakan mana kandidat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mana yang tidak. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan politik santri tidak semata-mata didasarkan pada evaluasi rasional terhadap program, visi, misi, dan rekam jejak kandidat, tetapi juga atau bahkan terutama didasarkan pada delegasi kepercayaan kepada otoritas tokoh keagamaan yang dianggap lebih kompeten dalam menilai kualitas moral dan religius kandidat⁴.

Namun dengan demikian, fenomena ini juga memunculkan berbagai pertanyaan kritis dan kekhawatiran akademis. Pertama, sejauh mana pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri dapat diukur secara empiris, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih seperti latar belakang sosial-ekonomi, akses terhadap informasi, afiliasi organisasi, dan preferensi ideologis personal. Kedua, apakah pengaruh tersebut bersifat

³ Saidin Ernas, *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta*.

⁴ Hafid Hafid, Siti Raudhatul Jannah, and Minan Jauhari, "Strategi Komunikasi Politik 'Nyantri' Prabowo Subianto dalam Memenangkan Pilpres 2024", *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, vol. 7, no. 2 (2024), pp. 262–77.

homogen di seluruh segmen santri, ataukah terdapat variasi berdasarkan karakteristik demografis, tingkat pendidikan, jenis pesantren (salafiyah vs modern), dan tingkat paparan terhadap media digital dan wacana politik alternatif⁵. Ketiga, dari perspektif normatif, bagaimana fenomena ini harus dipahami dalam kerangka teori demokrasi yang mengandaikan pemilih sebagai individu otonom yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan publik⁶. Keempat, apakah keterlibatan tokoh keagamaan dalam politik merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam demokrasi, ataukah merupakan bentuk politisasi agama yang dapat mengancam pluralisme dan toleransi politik⁷. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks Pemilu 2024 yang ditandai oleh polarisasi politik berbasis sentimen keagamaan dan meningkatnya penggunaan narasi religius dalam kampanye politik.

Dalam perspektif sosiologi agama, pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri dapat dipahami melalui konsep otoritas kharismatik Max Weber. Legitimasi kepemimpinan kyai didasarkan pada kualitas luar biasa yang diyakini santri, yaitu pengetahuan religius dan kebijaksanaan spiritual. Otoritas ini menciptakan relasi patron-klien, di mana santri memberikan loyalitas kepada kyai yang diyakini dapat membimbing mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat⁸. Namun, ketika otoritas kharismatik berbasis legitimasi religius ini ditransformasikan ke domain politik, muncul pertanyaan penting: apakah otoritas tersebut tetap mempertahankan basis legitimasinya, ataukah bergeser menjadi lebih transaksional dan instrumentalis? Selain itu, dalam konteks demokrasi modern yang menghendaki pemisahan otoritas religius dan politik, fenomena ini menimbulkan dilema tentang bagaimana menjaga pluralisme politik dan otonomi pemilih tanpa mendelegitimasi peran sosial tokoh keagamaan dalam komunitas mereka. Karena itu, penelitian tentang pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye Pemilu 2024 terhadap keputusan memilih santri di Yogyakarta menjadi penting untuk memahami dinamika relasi agama dan politik dalam demokrasi Indonesia kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi pengembangan studi sosiologi agama dan perilaku politik di Indonesia.

Permasalahan mendasar dari keterlibatan tokoh keagamaan dalam kampanye politik adalah ambiguitas terkait transformasi otoritas keagamaan menjadi instrumen mobilisasi politik dan implikasinya terhadap otonomi politik santri. Ketika santri cenderung memilih sesuai instruksi atau rekomendasi tokoh keagamaan (kyai dan ustadz), muncul pertanyaan fundamental: apakah keputusan mereka didasarkan pada evaluasi rasional terhadap kompetensi, integritas, dan program

⁵ R. William Liddle and Saiful Mujani, "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia", *Comparative Political Studies*, vol. 40, no. 7 (SAGE Publications Inc, 2007), pp. 832–57.

⁶ Eve Warburton and Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's democratic regression: Structure, agency and popular opinion", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 41, no. 2 (2019), pp. 255–85.

⁷ Fatikhatur Rizqya and Nadya Afdholi, "Nderek Kiai: Santri dalam Ideologi Politik Indonesia 2024: Nderek Kiai: Santri in 2024 Indonesian Political Ideology", *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 15, no. 2 (2024), pp. 230–41.

⁸ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Univ of California Press, 1978) hal 1158-1211.

kandidat, ataukah semata-mata manifestasi kepatuhan terhadap otoritas keagamaan?. Permasalahan ini semakin kompleks ketika praktik "sowan politik" elit kepada tokoh keagamaan diinterpretasikan santri sebagai bentuk legitimasi religius atau "restu" yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.⁹

Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi reduksi deliberasi politik, di mana proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan analisis kritis terhadap berbagai kandidat dan evaluasi kepentingan publik tereduksi menjadi delegasi kepercayaan kepada figur otoritas keagamaan. Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, pola ini berpotensi menghambat perkembangan kesadaran politik kritis dan literasi politik yang menjadi prasyarat partisipasi demokratis substantif. Lebih jauh, ketergantungan pada arahan politik tokoh keagamaan juga membuka ruang bagi eksploitasi politik melalui jalur keagamaan, di mana elit politik dapat memanfaatkan struktur hierarkis pesantren untuk mobilisasi elektoral tanpa harus membangun argumen politik substantif atau mempertanggungjawabkan program dan visi mereka secara langsung kepada konstituen.¹⁰

Dengan heterogenitas respons santri terhadap otoritas tokoh keagamaan dalam konteks politik, yang menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang memoderasi pengaruh tersebut. Tidak semua santri memiliki tingkat ketergantungan yang sama terhadap arahan politik kyai atau tokoh agama, dan variasi ini mencerminkan kompleksitas struktur sosial internal komunitas pesantren yang seringkali diabaikan dalam analisis politik elektoral. Tradisi pesantren di Jawa menunjukkan bahwa meskipun otoritas Kyai sangat kuat, terdapat variasi dalam cara santri merespons otoritas tersebut tergantung pada tingkat pendidikan, durasi mondok, dan paparan terhadap wacana luar pesantren. Dalam konteks kontemporer, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah lanskap informasi yang tersedia bagi santri, sehingga mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kyai sebagai satu-satunya sumber informasi dan referensi moral-politik. Santri generasi milenial dan Gen-Z yang memiliki akses terhadap media digital, platform diskusi online, dan komunitas virtual cenderung memiliki kapasitas kritis yang lebih tinggi dalam mengevaluasi informasi politik, termasuk rekomendasi politik dari tokoh keagamaan¹¹. Selain itu, perbedaan antara pesantren salafiyah yang mempertahankan tradisi pengajaran klasik dan pesantren modern yang mengintegrasikan kurikulum umum juga menciptakan variasi dalam pola sosialisasi politik santri. Permasalahan ini menunjukkan bahwa komunitas santri bukanlah kelompok homogen yang secara otomatis mengikuti arahan politik tokoh keagamaan, sehingga pemahaman yang lebih

⁹ Masruri Mahali, Wawan Sobari, and George Towar Iqbal Tawwakal, "Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View", *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, vol. 4, no. 2 (2019), pp. 75–89.

¹⁰ Denise Vitale, "Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas", *Philosophy & Social Criticism*, vol. 32, no. 6 (SAGE Publications Ltd, 2006), pp. 739–66.

¹¹ Abdulloh Hamid et al., "Literasi Digital Santri Milenial: Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Jihadul Chakim Mojokerto", *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 19, no. 1 (2024), pp. 89–100.

nuanced tentang kondisi-kondisi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh otoritas keagamaan menjadi sangat penting untuk menjelaskan dinamika perilaku politik santri secara komprehensif.

Implikasi normatif dan demokratis dari fenomena mobilisasi politik berbasis otoritas keagamaan terhadap kualitas demokrasi dan pluralisme politik. Dalam perspektif teori demokrasi, pemilih yang ideal adalah mereka yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai, pertimbangan rasional terhadap kepentingan publik, dan kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif politik yang tersedia. Ketika keputusan politik santri sangat ditentukan oleh otoritas tokoh keagamaan dengan asumsi bahwa "kyai memiliki ilmu lebih tinggi sehingga apa yang dipilihnya pasti benar" muncul kekhawatiran tentang lemahnya literasi politik dan kesadaran kritis dalam komunitas pesantren yang dapat berdampak pada kualitas partisipasi politik mereka. Perilaku pemilih Indonesia menunjukkan bahwa meskipun faktor agama memainkan peran penting dalam politik elektoral, pemilih Muslim Indonesia umumnya bersifat pragmatis dan tidak semata-mata mengikuti arahan tokoh agama tanpa pertimbangan lain. Namun, temuan ini perlu dikontekstualisasikan dengan karakteristik spesifik komunitas pesantren yang memiliki struktur otoritas yang lebih hierarkis dan budaya kepatuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan komunitas Muslim urban yang lebih heterogen. Lebih jauh, fenomena ini juga memunculkan risiko politisasi agama dan sektarianisme politik, di mana identitas keagamaan dan afiliasi kepada tokoh keagamaan tertentu menjadi basis utama mobilisasi politik yang dapat mengancam kohesi sosial dan toleransi antarkelompok¹². Dalam konteks Pemilu 2024 yang ditandai oleh polarisasi politik yang tinggi, keterlibatan aktif tokoh keagamaan dalam kampanye politik berpotensi memperdalam pembelahan sosial berbasis sentimen keagamaan dan mengurangi ruang bagi dialog politik yang substantif dan berorientasi pada isu-isu publik.

Berkaitan dengan keterbatasan studi empiris yang sistematis tentang pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri dalam konteks Indonesia kontemporer. Sebagian besar literatur yang ada lebih banyak membahas peran pesantren dalam pembentukan identitas keagamaan dan transmisi nilai-nilai Islam tradisional, sementara aspek politik elektoral dan perilaku memilih santri masih relatif underexplored. Meskipun kyai memiliki pengaruh politik yang signifikan, mobilisasi politik di kalangan nahdliyin tidak sepenuhnya deterministik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual¹³. Sebagian besar studi tentang perilaku politik santri bersifat kualitatif dan etnografis, sementara penelitian kuantitatif yang mengukur secara sistematis magnitude pengaruh otoritas tokoh keagamaan, mengidentifikasi faktor-faktor moderator, dan menguji hubungan kausal antara variabel-variabel terkait masih sangat terbatas. Gap pengetahuan ini menjadi permasalahan akademis yang signifikan, mengingat pentingnya komunitas santri

¹² R. William Liddle and Saiful Mujani, "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia", *Comparative Political Studies*, vol. 40, no. 7 (SAGE Publications Inc, 2007), pp. 832–57.

¹³ Dede Imam Muharrom, Karim Suryadi, and Sri Wahyuni Tanszil, "Pemahaman Agama dan Partisipasi Politik Santri: Studi Korelasional di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, Tasikmalaya", *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, vol. 5, no. 3 (2025), pp. 79–88.

sebagai segmen pemilih strategis dalam politik Indonesia dan urgensi untuk memahami dinamika perilaku politik mereka dalam konteks demokrasi yang terus berevolusi. Ketiadaan data empiris yang robust juga menghambat pengembangan kebijakan pendidikan politik dan literasi demokrasi yang efektif untuk komunitas pesantren, karena intervensi kebijakan memerlukan pemahaman yang berbasis bukti tentang bagaimana santri membuat keputusan politik dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Secara khusus dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, permasalahan yang muncul adalah ketiadaan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana dinamika lokal seperti pluralitas tradisi intelektual, interaksi antara otoritas keagamaan dan otoritas kultural Keraton, serta tingkat paparan santri terhadap wacana akademik dan politik alternatif mempengaruhi pola hubungan antara otoritas tokoh keagamaan dan keputusan politik santri. Yogyakarta memiliki karakteristik unik sebagai kota pendidikan dan pusat pluralisme intelektual, di mana santri tidak hanya terpapar pada tradisi pesantren tetapi juga pada diskursus akademik, aktivisme sosial, dan gerakan sipil yang lebih progresif. Interaksi antara berbagai tradisi ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam memahami perilaku politik santri di Yogyakarta, yang mungkin berbeda secara signifikan dengan pola di daerah lain yang memiliki struktur sosial dan lanskap politik yang berbeda. Ketiadaan penelitian empiris yang fokus pada konteks Yogyakarta menjadi permasalahan tersendiri, karena generalisasi temuan dari konteks lain mungkin tidak sepenuhnya applicable mengingat spesifisitas sosial-politik lokal¹⁴. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Yogyakarta menjadi sangat relevan dan urgen untuk mengisi gap pengetahuan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi pengembangan studi sosiologi agama, perilaku politik, dan demokrasi di Indonesia.

Faktor penyebab utama dari fenomena pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri berakar pada struktur sosial pesantren yang hierarkis dan sistem otoritas kharismatik yang telah terlembagakan secara historis dalam tradisi pesantren di Indonesia. Secara struktural, pesantren membangun relasi patron-klien antara kyai dan santri yang didasarkan pada kepercayaan mendalam terhadap superioritas pengetahuan religius dan kebijaksanaan spiritual kyai. Sistem pendidikan pesantren yang menempatkan tokoh keagamaan seperti kyai sebagai sumber utama pengetahuan agama, pembimbing spiritual, dan figur panutan moral menciptakan ketergantungan epistemologis santri terhadap kyai dalam memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan-persoalan yang bersifat duniawi seperti politik¹⁵. Budaya "sami'na wa atha'na" (mendengar dan taat) yang mengakar dalam tradisi pesantren salafiyah memperkuat pola kepatuhan

¹⁴ Saidin Ernas and Ferry Muhammadsyah Siregar, "Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di YOGYAKARTA", *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 25, no. 2 (2010), p. 37094.

¹⁵ Setiawan, "EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN".

ini, di mana mempertanyakan atau mengkritisi arahan kyai dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan sebagai pelanggaran terhadap adab kepada guru. Secara kultural, konsep barakah (berkah) yang diyakini dapat diperoleh melalui kepatuhan kepada kyai menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif, karena santri meyakini bahwa keberkahan hidup mereka baik di dunia maupun akhirat bergantung pada ridho dan doa kyai. Ketika struktur otoritas dan sistem kepercayaan ini berinteraksi dengan konteks politik elektoral, maka arahan atau rekomendasi politik kyai cenderung diterima sebagai bentuk bimbingan spiritual yang harus diikuti, bukan sebagai opini politik yang dapat diperdebatkan atau dievaluasi secara kritis¹⁶. Faktor struktural-kultural ini diperkuat oleh kondisi geografis dan sosial pesantren yang seringkali berlokasi di daerah rural atau semi-urban dengan akses terbatas terhadap sumber informasi alternatif, sehingga kyai menjadi *gatekeeper* (penjaga gerbang) utama informasi dan interpretasi terhadap realitas sosial-politik bagi santri.

Faktor penyebab kedua adalah strategi mobilisasi politik elite yang secara sengaja memanfaatkan struktur otoritas keagamaan pesantren sebagai jalur efektif untuk memperoleh dukungan elektoral. Praktik "sowan politik" oleh kandidat atau tim kampanye ke berbagai pondok pesantren dan tokoh keagamaan merupakan strategi rasional dalam konteks persaingan elektoral, karena dukungan dari tokoh keagamaan yang memiliki basis massa santri dapat diterjemahkan menjadi suara pemilih dalam jumlah signifikan. Elit politik menyadari bahwa struktur hierarkis pesantren memungkinkan mobilisasi politik yang lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan kampanye konvensional yang harus menjangkau pemilih secara individual, karena dukungan dari satu kyai berpengaruh dapat memobilisasi ribuan santri dan alumni pesantren yang masih mempertahankan ikatan emosional dan spiritual dengan kyai mereka¹⁷. Fenomena ini semakin intensif pada Pemilu 2024 di mana berbagai kandidat dan partai politik berlomba-lomba melakukan pendekatan kepada tokoh keagamaan, menawarkan berbagai bentuk patronase politik, dan membangun narasi keagamaan untuk melegitimasi posisi politik mereka. Selain itu, polarisasi politik yang menguat di Indonesia pasca-Pemilu 2014 dan 2019 telah mendorong politisasi identitas keagamaan, di mana isu-isu agama dan representasi Muslim dalam politik menjadi tema sentral dalam kampanye elektoral. Dalam konteks ini, tokoh keagamaan tidak hanya didekati sebagai broker politik yang dapat memobilisasi massa, tetapi juga sebagai sumber legitimasi moral-religius yang dapat memperkuat klaim kandidat tertentu sebagai "pilihan yang sesuai dengan Islam" atau "pemimpin yang peduli terhadap kepentingan umat Islam." Faktor eksternal berupa strategi elite

¹⁶ Resta Tultuffia Sari et al., "OTORITAS DAN FEODALISME DALAM TRADISI PESANTREN INDONESIA: SEBUAH KAJIAN INTERDISIPLINER TENTANG KEKUASAAN, PENGETAHUAN, DAN MODAL KEAGAMAAN", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 4 (2025).

¹⁷ Hafid Hafid, Siti Raudhatul Jannah, and Minan Jauhari, "Strategi Komunikasi Politik 'Nyantri' Prabowo Subianto dalam Memenangkan Pilpres 2024", *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, vol. 7, no. 2 (2024), pp. 262–77.

politik ini berinteraksi dengan faktor internal struktur pesantren, menciptakan sinergi yang memperkuat pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri¹⁸.

Faktor penyebab ketiga adalah transformasi peran sosial-politik tokoh keagamaan dalam konteks demokratisasi Indonesia, di mana batas antara otoritas religius dan otoritas politik menjadi semakin kabur. Pasca-reformasi 1998, tokoh keagamaan mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk terlibat dalam politik praktis, baik melalui partai politik berbasis agama, organisasi masyarakat sipil keagamaan, maupun sebagai konsultan atau juru kampanye kandidat tertentu. Keterlibatan politik tokoh keagamaan ini dilegitimasi oleh wacana tentang tanggung jawab umat Islam untuk memilih pemimpin yang saleh dan memperjuangkan kepentingan Islam dalam ranah publik, yang kemudian diterjemahkan sebagai kewajiban moral bagi tokoh keagamaan untuk memberikan panduan politik kepada umat. Namun, transformasi peran ini juga didorong oleh faktor ekonomi-politik, di mana pesantren sebagai institusi memerlukan sumber daya material untuk mempertahankan operasionalnya, dan dukungan dari elit politik dapat membuka akses terhadap berbagai bentuk patronase seperti bantuan pembangunan infrastruktur pesantren, beasiswa santri, atau program-program pemberdayaan ekonomi. Dalam beberapa kasus, tokoh keagamaan yang memberikan dukungan politik juga memperoleh posisi strategis dalam struktur pemerintahan atau akses terhadap proses kebijakan publik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Faktor-faktor material ini menciptakan insentif bagi tokoh keagamaan untuk terlibat aktif dalam politik elektoral, dan keterlibatan mereka kemudian mempengaruhi preferensi politik santri yang masih memandang kyai sebagai figur yang tidak hanya memiliki otoritas spiritual tetapi juga kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan komunitas pesantren dalam arena politik formal. Kombinasi antara faktor struktural-kultural internal pesantren, strategi mobilisasi elit politik, dan transformasi peran sosial-politik tokoh keagamaan menciptakan kondisi di mana otoritas tokoh keagamaan menjadi faktor determinan dalam keputusan politik santri, terutama dalam konteks Pemilu 2024 yang ditandai oleh kompetisi elektoral yang ketat dan polarisasi politik berbasis sentimen keagamaan yang semakin menguat¹⁹.

Apabila permasalahan pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri tidak dipahami secara mendalam dan kritis maka akan muncul degenerasi kualitas partisipasi politik santri dan melemahnya literasi politik di kalangan komunitas pesantren. Pada level individu, santri yang secara konsisten mendelegasikan keputusan politiknya kepada otoritas tokoh keagamaan tanpa proses evaluasi kritis akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas berpikir politik yang otonom dan kemampuan untuk mengevaluasi isu-isu publik secara substantif. Ketergantungan epistemologis terhadap kyai dalam domain politik dapat menghambat

¹⁸ Sihono - - and Fitriyah - -, “Santri, Kyai, dan Pesantren (Studi Kasus: Kemenangan Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2018)”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 9, no. 04 (2020), pp. 175–84.

¹⁹ Saidin Ernas, “Bias Politik Pesantren: Dari Pragmatisme-Transaksional Hingga Resistensi Sosial”, *Jurnal Studi Pemerintahan* (2011), <https://jsp.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/210>, accessed 27 May 2026.

perkembangan kesadaran kritis santri tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, sehingga menciptakan pemilih yang pasif dan tidak deliberatif. Dalam jangka panjang, pola ini akan memproduksi generasi santri yang memiliki keterbatasan dalam menganalisis kompleksitas persoalan politik, mengevaluasi kinerja pemerintahan, dan mempertanggungjawabkan pilihan politik mereka berdasarkan kepentingan publik. Pada level kelompok, ketergantungan komunitas santri pada arahan politik tokoh keagamaan berpotensi menciptakan homogenisasi preferensi politik yang mengabaikan keragaman kepentingan, aspirasi, dan perspektif di dalam komunitas pesantren itu sendiri. Santri yang memiliki pandangan politik berbeda dari tokoh keagamaan atau kyai mereka mungkin mengalami tekanan sosial untuk menyesuaikan pilihan politik mereka demi menjaga harmoni sosial atau menghindari stigma sebagai santri yang tidak patuh, sehingga ruang untuk ekspresi politik yang asli atau khas dan beragam menjadi terbatas. Dampak ini akan semakin problematis ketika arahan politik tokoh keagamaan didasarkan pada pertimbangan yang bersifat transaksional atau dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek pesantren sebagai institusi, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan jangka panjang santri sebagai individu atau dengan kepentingan publik yang lebih luas²⁰.

Dampak yang tidak kalah serius adalah adanya risiko politisasi agama dan fragmentasi sosial berbasis sentimen keagamaan yang dapat mengancam kohesi sosial dan kualitas demokrasi Indonesia. Ketika tokoh keagamaan secara aktif terlibat dalam kampanye politik dengan memberikan legitimasi religius kepada kandidat tertentu, kontestasi elektoral bertransformasi dari logika persaingan programatik menjadi pertarungan identitas keagamaan dan loyalitas kepada figur otoritas religius. Fenomena ini dapat memperdalam polarisasi politik, di mana pemilih tidak lagi melihat kandidat dari kubu berbeda sebagai kompetitor sah melainkan sebagai ancaman terhadap kepentingan agama, serta menciptakan eksklusivisme politik di mana kelompok keagamaan tertentu merasa memiliki klaim moral superior sementara kelompok lain termarginalkan dalam diskursus politik. Dampak jangka panjangnya adalah erosi toleransi politik dan melemahnya pluralisme sebagai fondasi demokrasi Indonesia, karena perbedaan politik tidak lagi dipandang sebagai bagian normal dari proses demokratis melainkan sebagai perbedaan dalam komitmen keagamaan. Lebih jauh, ketika agama menjadi instrumen mobilisasi politik utama, isu-isu substantif seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan penegakan hukum dapat terabaikan, sehingga kualitas debat publik dan akuntabilitas pemerintahan terhadap isu-isu yang langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat menjadi menurun²¹.

²⁰ Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 11, no. 2 (2018), pp. 365–400.

²¹ Firdaus M. Yunus, Taslim HM Yasin, and Syamsul Rijal, "Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, vol. 9, no. 2 (2023), pp. 121–37.

Selain itu, terdapat dampak berupa kerentanan komunitas santri terhadap manipulasi politik dan melemahnya posisi tawar pesantren sebagai institusi pendidikan independen. Ketika struktur otoritas pesantren dapat dimanfaatkan sebagai jalur mobilisasi elektoral yang efisien, elite politik memiliki insentif kuat untuk mengambil alih peran tokoh keagamaan melalui berbagai bentuk patronase, janji politik, atau transaksi material yang dapat mengkompromikan independensi moral mereka. Dalam konteks ini, santri yang bergantung pada arahan kyai menjadi objek mobilisasi politik yang dapat dimanipulasi tanpa disadari, karena mereka menerima arahan politik atas dasar kepercayaan spiritual bukan evaluasi kritis terhadap kepentingan politik yang sesungguhnya dipertaruhkan. Pada level institusional, pesantren yang tokoh keagamaannya terlibat secara partisan dalam politik praktis berisiko kehilangan posisinya sebagai ruang pendidikan netral dan kepercayaan dari masyarakat dengan afiliasi politik berbeda. Lebih jauh, jika keterlibatan politik tokoh keagamaan didorong motif transaksional seperti memperoleh akses terhadap sumber daya negara atau posisi dalam struktur kekuasaan, hal ini dapat mengontaminasi misi edukatif dan spiritual pesantren dengan logika politik pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan dan material, serta dalam jangka panjang merusak kredibilitas moral pesantren sebagai benteng nilai-nilai etika dan spiritualitas²². Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri menjadi sangat penting tidak hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk merumuskan strategi pendidikan politik dan penguatan literasi demokrasi yang dapat menjaga keseimbangan antara menghormati otoritas keagamaan dan mengembangkan otonomi politik serta kesadaran kritis santri, sehingga komunitas pesantren dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara substantif dan bermartabat.

Untuk memahami dan mengatasi permasalahan kompleks terkait pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri, diperlukan pendekatan penelitian yang komprehensif dan sistematis yang mampu mengukur secara empiris magnitude pengaruh tersebut sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kondisional yang memoderasi hubungan antara otoritas keagamaan dan perilaku politik santri. Penelitian kuantitatif dengan desain survei yang melibatkan sampel representatif santri di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan data berbasis bukti tentang seberapa besar pengaruh otoritas tokoh keagamaan, dalam kondisi apa pengaruh tersebut paling kuat atau paling lemah, dan bagaimana variasi karakteristik santri (seperti tingkat pendidikan, akses informasi digital, jenis pesantren, usia, dan lama mondok) mempengaruhi responsivitas mereka terhadap arahan politik tokoh keagamaan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor moderator ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang heterogenitas komunitas santri dan menghindarkan generalisasi yang terlalu menyederhanakan tentang perilaku politik mereka. Temuan penelitian semacam ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori

²² Edward Aspinall and Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election]*, vol. 1 (Yogyakarta, Indonesia: Research Centre for Politics and Government, 2015).

perilaku pemilih dalam konteks komunitas berbasis keagamaan, tetapi juga dapat menjadi landasan empiris untuk merumuskan intervensi pendidikan politik yang lebih efektif dan kontekstual bagi komunitas pesantren, dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik dan kebutuhan santri²³.

Selain pendekatan empiris-kuantitatif, solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara menghormati otoritas keagamaan dan mengembangkan otonomi politik santri memerlukan penguatan literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan kritis di lingkungan pesantren. Program pendidikan politik yang dirancang khusus untuk konteks pesantren perlu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga santri dapat memahami bahwa kemampuan untuk mengevaluasi isu-isu politik secara kritis dan membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan rasional bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap kyai, melainkan justru merupakan ekspresi dari kematangan intelektual dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi pendidikan pesantren, dan tokoh keagamaan yang progresif untuk mengembangkan kurikulum dan metode pedagogi yang dapat memfasilitasi santri dalam mengembangkan kesadaran politik kritis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kepatuhan dan penghormatan terhadap guru yang menjadi bagian integral dari tradisi pesantren. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai platform pendidikan politik alternatif dapat membantu santri mengakses informasi yang beragam, terlibat dalam diskusi politik yang lebih terbuka, dan mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi berbagai perspektif politik secara independen, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber informasi atau satu figur otoritas dalam membentuk preferensi politik mereka.²⁴

Pada level kebijakan dan regulasi, diperlukan upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam keterlibatan tokoh keagamaan dalam politik elektoral, sehingga dapat meminimalkan risiko eksploitasi dan manipulasi politik melalui jalur keagamaan. Pengembangan kode etik atau panduan perilaku politik bagi tokoh keagamaan yang disusun secara partisipatif oleh organisasi masyarakat sipil keagamaan, akademisi, dan praktisi pesantren dapat membantu menetapkan batas-batas yang jelas antara hak tokoh keagamaan untuk berpartisipasi dalam politik sebagai warga negara dan tanggung jawab mereka untuk menjaga independensi moral serta melindungi kepentingan santri dari eksploitasi politik. Selain itu, penguatan peran lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan ruang dialog dan diskusi kritis tentang relasi antara agama dan politik dapat membantu menciptakan kesadaran publik yang lebih luas tentang pentingnya menjaga pluralisme politik dan menghindari politisasi agama yang berlebihan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian akademis yang berbasis bukti tentang dinamika pengaruh otoritas keagamaan terhadap perilaku politik santri, seperti yang akan dilakukan

²³ Restu Rahmawati et al., "Penguatan Literasi Politik bagi Santri melalui Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Digital di Pesantren Musyidul Falah 2 Purwakarta", *Jurnal SOLMA*, vol. 14, no. 3 (2025), pp. 4793–807.

²⁴ Dr Jennifer L. Epley, *Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics*, vol. 5, no. 7 (2015).

dalam penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi keagamaan, dan institusi pesantren itu sendiri, untuk merumuskan strategi yang lebih bertanggung jawab dalam melibatkan komunitas keagamaan dalam proses demokrasi, sehingga partisipasi politik santri dapat berlangsung secara substantif, bermartabat, dan berkontribusi pada penguatan kualitas demokrasi Indonesia.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan dan urgensi solusi yang telah diuraikan di atas, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pendekatan kuantitatif. Meskipun terdapat sejumlah studi tentang peran pesantren dalam politik Indonesia dan pengaruh tokoh keagamaan dalam mobilisasi sosial-politik, sebagian besar penelitian tersebut bersifat kualitatif-etnografis dan dilakukan dalam konteks periode elektoral sebelum era digital dan polarisasi politik kontemporer yang semakin intens. Penelitian kuantitatif yang secara sistematis mengukur magnitudo pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri, mengidentifikasi faktor-faktor moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut, dan menguji hubungan kausal antara variabel-variabel terkait dalam konteks Pemilu 2024 masih sangat terbatas. Terlebih lagi, konteks spesifik Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik unik sebagai pusat pendidikan, pluralisme intelektual, dan interaksi antara otoritas keagamaan dengan otoritas kultural Keraton belum banyak menjadi fokus penelitian empiris tentang perilaku politik santri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah pengetahuan (research gap) tersebut dengan menyediakan data empiris berbasis survei yang dapat mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh otoritas tokoh keagamaan, dalam kondisi apa pengaruh tersebut bervariasi, dan bagaimana santri dengan karakteristik berbeda merespons arahan politik dari tokoh keagamaan mereka dalam konteks Pemilu 2024 yang ditandai oleh kompetisi elektoral ketat dan penggunaan intensif narasi keagamaan dalam kampanye politik.

Pemilihan topik ini juga didorong oleh relevansi akademis dan praktis dari temuan yang akan dihasilkan. Dari perspektif sosiologi agama, penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang bagaimana otoritas keagamaan beroperasi dalam konteks politik modern, bagaimana otoritas kharismatik yang berbasis legitimasi religius ditransformasikan ke dalam domain politik elektoral, dan bagaimana struktur sosial pesantren yang hierarkis berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengandaikan otonomi individu. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi berbagai stakeholder, termasuk institusi pesantren, organisasi masyarakat sipil keagamaan, pembuat kebijakan pendidikan, dan praktisi demokrasi dalam merumuskan strategi penguatan literasi politik santri yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan, sekaligus menjaga independensi moral pesantren dari eksploitasi politik yang oportunistik. Dengan fokus pada Pemilu 2024 sebagai konteks temporal dan Yogyakarta sebagai konteks geografis yang spesifik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya memiliki validitas internal yang kuat tetapi juga memberikan wawasan kontekstual

yang kaya tentang bagaimana dinamika lokal mempengaruhi pola hubungan antara otoritas keagamaan dan perilaku politik santri, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan studi sosiologi agama dan politik di Indonesia yang lebih berbasis bukti dan responsif terhadap kompleksitas realitas sosial kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Otoritas Tokoh Keagamaan dalam Kampanye Publik terhadap Keputusan Memilih Santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Seberapa besar pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Faktor-faktor apa saja yang memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah otoritas tokoh keagamaan dalam ke ikut sertaan pada kampanye publik memiliki pengaruh terhadap keputusan memilih santri pada pemilu 2024 di daerah istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti setiap penelitian itu memiliki kegunaan dan manfaatnya masing-masing. Berdasarkan adanya tujuan penelitian ini diatas, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah kontribusi dan pengetahuan dalam kajian bidang keilmuan seperti: Bidang sosiologi, agama, politik, selain itu juga diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori tentang bagaimana otoritas

keagamaan itu dapat dimobilisasi untuk mempengaruhi pilihan santri pada elite politik, serta diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi santri dalam memperluas pandangan dan pengetahuan tentang politik yang ada di Indonesia, yang mana negara Indonesia merupakan negara demokratis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ke berbagai kalangan seperti lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan dalam membuat kebijakan maupun kegiatan tentang pentingnya pengetahuan politik bagi santri.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini telah melakukan tinjauan-tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang dimaksudkan agar dapat mempermudah penelitian ini kedepannya dan juga agar dapat berguna dalam menentukan research gap antara penelitian-penelitian yang telah ada dengan penelitian ini yang masih satu tema penelitian. Ada beberapa penelitian yang diacu dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, Zuliansyah, M. (2015) dalam disertasinya yang berjudul "*Sowan Kyai, Strategi dalam Budaya Komunikasi Politik di Indonesia*" (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya) mengkaji fenomena "sowan politik" sebagai strategi komunikasi politik yang memanfaatkan otoritas kultural dan religius kyai. Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik berkunjung ke kyai oleh politisi menjadi ritual simbolik yang memberikan legitimasi religius kepada kandidat politik. Zuliansyah menemukan bahwa sowan politik efektif sebagai strategi kampanye karena memanfaatkan kepercayaan dan kepatuhan santri terhadap kyai. Namun, penelitian Zuliansyah lebih berfokus pada perspektif elite politik dan strategi kampanye mereka, bukan pada respons atau keputusan politik santri sebagai pemilih. Penelitian tersebut juga bersifat kualitatif-deskriptif dan tidak mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh sowan politik terhadap keputusan memilih santri, serta tidak mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi pengaruh tersebut.²⁵

Kedua, Laura Annisa Sinarsari dan Muhammad Adnan (n.d.) dalam penelitian mereka "*Peran Kiai dalam Mobilisasi Politik Melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2024*" menganalisis bagaimana jaringan formal kyai dimobilisasi untuk tujuan politik elektoral dalam Pemilu 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa kyai tidak hanya berperan sebagai figur individual, tetapi juga terorganisir dalam jaringan yang memiliki kapasitas mobilisasi massa yang signifikan. Meskipun penelitian ini kontemporer dan relevan dengan Pemilu 2024, fokusnya adalah pada struktur organisasi dan strategi mobilisasi kyai di Jawa Timur, bukan pada pengaruh terhadap keputusan individual santri. Selain itu, konteks geografis

²⁵ Zuliansyah, MAlfien, "Sowan Kyai, Strategi dalam Budaya Komunikasi Politik di Indonesia" (2015), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/121414>.

Jawa Timur berbeda dengan Yogyakarta yang memiliki karakteristik unik sebagai kota pendidikan dengan pluralitas intelektual yang tinggi.²⁶

Ketiga, Fatimatuz Zahro dan Fenolia Intan Saputri (n.d.) dalam penelitian "*Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024*" mengkaji bagaimana polarisasi politik nasional pada Pemilu 2024 termanifestasi dalam komunitas pesantren. Penelitian ini menemukan bahwa pesantren tidak imun terhadap polarisasi politik dan bahwa terdapat perbedaan preferensi politik di antara santri yang mencerminkan perpecahan politik nasional. Penelitian Zahro dan Saputri memberikan kontribusi penting tentang fenomena polarisasi dalam pesantren, namun tidak secara spesifik mengukur pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik santri. Penelitian ini juga tidak mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa beberapa santri lebih terpengaruh oleh polarisasi dibandingkan yang lain.²⁷

Keempat, Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2018) dalam "*Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*" (Cambridge: Cambridge University Press) menganalisis perilaku pemilih Indonesia berdasarkan data survei nasional. Mereka menemukan bahwa meskipun faktor agama memainkan peran penting dalam politik elektoral Indonesia, pemilih Muslim Indonesia umumnya bersifat pragmatis dan tidak semata-mata mengikuti arahan tokoh agama tanpa pertimbangan lain. Temuan Mujani dkk. memberikan kontribusi penting tentang pragmatisme pemilih Muslim Indonesia secara umum, namun penelitian mereka menggunakan sampel pemilih umum yang heterogen dan tidak fokus secara spesifik pada komunitas santri pesantren yang memiliki karakteristik unik.²⁸

Kelima, NAJMI, NUR (2024). Pengaruh Perilaku Politik Kiai Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Terhadap Perilaku Memilih Santri pada Pilpres 2024. Fokus: Mengukur besaran pengaruh perilaku politik kiai terhadap perilaku memilih santri. Metode: Kuantitatif Eksplanatif. Terdapat pengaruh positif dan signifikan (41,7%) antara perilaku politik kiai terhadap perilaku memilih santri pada Pilpres 2024. Sisanya (58,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.²⁹

Keenam, Farid Abdillah and Baktiawan Nusanto. (2024). Peran Tokoh Agama dalam Mempengaruhi Afiliasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2024. Melalui studi kasus kualitatif di Situbondo, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh tokoh agama sangat dominan dalam

²⁶ Laura Annisa Sinarsari and Muhammad Ghulam Adnan, "PERAN KIAI DALAM MOBILISASI POLITIK MELALUI JARINGAN KIAI SANTRI NASIONAL (JKSN) JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 2 (2025), pp. 884–904.

²⁷ Fatimatuz Zahro and Fenolia Intan Saputri, "Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024", *Manabia: Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 01 (2024), pp. 21–36.

²⁸ Edward Aspinall, "Voter Behavior in Indonesia Since Democratization: Critical Democrats. By Saiful Mujani, R. William Liddle, and Kuskridho Ambardi. New York: Cambridge University Press, 2018. 286p. \$99.99 cloth.", *Perspectives on Politics*, vol. 17, no. 02 (2019), pp. 595–7.

²⁹ NUR NAJMI, "PENGARUH PERILAKU POLITIK KIAI PESANTREN MIFTAHUL HUDA MANONJAYA TERHADAP PERILAKU MEMILIH SANTRI PADA PILPRES 2024", other (Universitas Siliwangi, 2024), <https://repository.unsil.ac.id/id/eprint/189/>, accessed 9 Dec 2025.

pembentukan afiliasi politik masyarakat lokal. Dominasi ini disebabkan karena tokoh agama dilihat sebagai figur yang memengaruhi keputusan politik secara otomatis, tulus, dan turun-temurun melalui kekuatan moral dan ikatan emosional.³⁰

Ketujuh, Mufid, S. (2023). Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap Perilaku Memilih para Pemilih Pemula. Penelitian kuantitatif ini menguji pengaruh kelompok acuan pada pemilih pemula (yang sebagian besar adalah santri). Temuan krusialnya adalah meskipun pengaruh Tokoh Agama signifikan, tingkat pengaruhnya tergolong rendah (sekitar 7.1%), jauh di bawah kelompok acuan lain. Hasil ini menyiratkan adanya desentralisasi loyalitas politik santri dari otoritas tunggal kiai.³¹

Kedelapan, Camilla Yssam Madani dan Kacung Marijan. (2019). Pengaruh Kiai Terhadap Perilaku Memilih Alumni Santri Pondok Pesantren MBI Amanatul Ummah Pacet pada Pemilu Presiden 2019. Studi *mix method* ini, meskipun berbasis data Pemilu 2019, penting karena menunjukkan bahwa pengaruh kiai terhadap alumni santri berada pada kekuatan 'cukup'. Lebih lanjut, perilaku memilih alumni santri lebih didominasi oleh pilihan rasional (program calon) dan faktor sosiologis, bukan kepatuhan mutlak.³²

Kesembilan, Faisal, M. (2022). Kepemimpinan Kiai dalam Menguatkan Sikap Moderasi Santri. Penelitian kualitatif ini menggarisbawahi otoritas penuh yang dimiliki kiai dalam domain pendidikan dan moral di pesantren. Kiai berperan sebagai penentu arah dan agen perubahan. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi otoritas kiai kuat dalam domain moral, yang menjadi landasan teoritis bagi upaya transformasi pengaruh ke domain politik.³³

Kesepuluh, Mahatva Yoga Adipradana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Relasi Sosial Politik dan Sesebuah Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang" mengkaji strategi pemetaan politik elit melalui relasi dengan pemilik langgar sebagai tokoh informal di pedesaan. penelitian ini menggunakan survei responden berjumlah 480 orang, peneliti tersebut menemukan bahwa 27% responden memberikan suara berdasarkan arahan sesebuah/tokoh desa, menjadikannya faktor tertinggi dalam preferensi memilih. penelitian ini menunjukkan bahwa langgar dapat menjadi institusi kultural efektif untuk mobilisasi elektoral karena pemilik langgar memiliki modal sosial yang dapat memobilisasi kelompok masyarakat secara kolektif. namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadi researchgap pada penelitian ini. keterbatasan pada penelitian ini adalah

³⁰ Farid Abdillah and Baktiawan Nusanto, "PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPENGARUHI AFILIASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO)", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 4 (2025), pp. 61–70.

³¹ Meike Kurniawati, *Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap Perilaku Memilih para Pemilih Pemula*.

³² Camilla Yssam Madani and Kacung Marijan, *PENGARUH KIAI TERHADAP PERILAKU MEMILIH ALUMNI SANTRI PONDOK PESANTREN MBI AMANATUL UMMAH PACET ANGKATAN 2017 PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019*, vol. 7, no. 1.

³³ Arif Khairur Rozaq, "Kepemimpinan Kiai dalam Menguatkan Sikap Moderasi Santri: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Khoirot Karangsono Pagelaran Malang", masters (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <https://etheses.uin-malang.ac.id/39008/>, accessed 9 Dec 2025.

pada mekanisme strategi elit (top-down), bukan proses pada pengambilan keputusan santri sebagai pemilih (bottom-up). selanjutnya dan ada variabel penelitian tersebut merupakan tokoh informal pemilik langgar tanpa struktur otoritas sistematis, sedangkan pada penelitian ini fokus pada otoritas formal kyai atau tokoh agama dalam pesantren yang memiliki hierarki lebih kuat, hubungan patron-klien lebih intens, dan budaya kepatuhan terlembagakan. selanjutnya, penelitian tersebut tidak mengukur magnitudo pengaruh secara kuantitatif melalui analisis regresi, hanya mengidentifikasi arahan sesepuh sebagai salah satu faktor tanpa mengukur besaran pengaruh dan faktor yang memoderasinya.³⁴

E. Kerangka Teori

1. Otoritas Tokoh Keagamaan.

a. Pengertian otoritas tokoh agama

Otoritas tokoh keagamaan merujuk pada posisi kehormatan, pengaruh moral, dan legitimasi spiritual yang dimiliki seorang kyai atau ustadz dalam komunitasnya. Dalam tradisi pesantren, kyai dipandang sebagai figur yang memiliki kharisma (charismatic authority) yang bersumber dari pengetahuan agama, keteladanan, dan status genealogis keilmuan. Max Weber menjelaskan bahwa otoritas karismatik muncul karena pengikut menganggap pemimpin memiliki kualitas spiritual yang tidak dimiliki orang lain.³⁵

Dalam konteks kehidupan pesantren dan santri, otoritas keagamaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga mencakup wilayah sosial, budaya, bahkan politik. Arahan politik dari seorang tokoh agama sering dipahami sebagai bagian dari ketaatan religius. Dengan demikian, otoritas tokoh keagamaan menjadi variabel penting untuk menjelaskan bagaimana individu (santri) mengambil keputusan politik. Indikator otoritas tokoh keagamaan dalam penelitian ini mencakup kepercayaan, kepatuhan, legitimasi, intensitas interaksi religius, dan pengaruh sosial yang dimiliki kyai.³⁶

b. Indikator Otoritas Tokoh Agama

Indikator otoritas tokoh agama dalam penelitian ini terdapat lima aspek yaitu:

1. Kharisma tokoh agama: Tingkat pengakuan dan penghormatan emosional santri terhadap keunggulan spiritual, moral, atau intelektual tokoh agama, diukur melalui penilaian subjektif santri.

³⁴ Mahatva Yoga Adi Pradana, "RELASI SOSIAL ELIT POLITIK DAN SESEPUH DESA MELALUI LANGGAR DI KABUPATEN MALANG", *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 13, no. 1 (2019), pp. 181–206.

³⁵ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Univ of California Press, 1978).

³⁶ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik: membaca citra politik kyai* (UIN-Malang Press, 2009).

2. Kepercayaan santri: Tingkat keyakinan santri terhadap integritas, kejujuran, dan kebenaran ajaran/arahan tokoh agama yang menjadi dasar penerimaan informasi atau arahan.
3. Kepatuhan pada arahan kyai: Kecenderungan santri untuk mengikuti atau menuruti nasihat, anjuran, atau instruksi politik yang diberikan oleh kyai/tokoh agama, diukur dari kemauan bertindak.
4. Legitimasi politik: Pengakuan santri bahwa tokoh agama memiliki hak dan wewenang moral untuk terlibat dan memberikan arahan dalam urusan politik praktis atau Pemilu.
5. Intensitas interaksi religius: Frekuensi dan kualitas interaksi santri dengan tokoh agama dalam konteks ritual, pengajian, atau kegiatan keagamaan non-formal di lingkungan pesantren.

2. Kampanye Publik Tokoh Agama

a. Pengertian Kampanye Publik Tokoh Agama

Kampanye publik tokoh keagamaan adalah aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh kyai, ustadz, atau figur religius melalui ceramah, forum keagamaan, media sosial, maupun pertemuan publik yang menyampaikan dukungan kepada kandidat tertentu. Kampanye publik ini membawa simbol dan legitimasi religius yang berfungsi mempengaruhi persepsi pemilih. Secara konseptual, kampanye publik tokoh agama adalah bentuk mobilisasi elektoral yang menggabungkan pesan politik dengan otoritas moral-religius sehingga berpotensi membentuk preferensi politik kelompok yang memiliki hubungan kedekatan spiritual, seperti santri.³⁷

b. Indikator Kampanye publik Tokoh Agama

Indikator kampanye publik dalam penelitian ini terdapat empat indikator. Empat indikator tersebut yaitu:

1. Motivasi religius memilih: Persepsi santri bahwa tindakan memilih (calon tertentu) adalah bagai kewajiban atau anjuran agama yang didapatkan dari arahan tokoh agama.
2. Arah dukungan dalam majelis taklim: Frekuensi penyampaian atau penyebutan dukungan politik kepada kandidat/partai tertentu oleh tokoh agama selama sesi pengajian atau majelis taklim.
3. Ajakan memilih: Tingkat penerimaan santri terhadap pesan eksplisit atau implisit dari tokoh agama yang menganjurkan atau mengarahkan pemilihan kandidat tertentu.

³⁷ Amar Muhyi Dinis Sipa, Hopizal Wadi, and Fahrurrazi Fahrurrazi, "Religion and Politics: Symbolization of Religion in the contestation of legislative elections 2019", *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, vol. 2, no. 2 (2021), pp. 38–43.

4. Penggunaan simbol religius dalam kampanye: Persepsi santri terhadap frekuensi penggunaan atribut, istilah, atau referensi keagamaan oleh tokoh agama saat mendukung kandidat di ruang publik.

3. Perilaku Keputusan dalam Memilih Santri

a. Pengertian Perilaku Keputusan dalam Memilih Santri

Perilaku memilih merupakan bentuk perilaku politik yang dipengaruhi oleh nilai, preferensi, lingkungan sosial, dan otoritas figur penting dalam kehidupan individu. Dalam konteks santri, perilaku memilih sering kali tidak murni rasional seperti dalam teori perilaku politik umum; sebaliknya, ia sangat dipengaruhi oleh relasi emosional, religius, dan normatif dengan kyai.³⁸

Santri cenderung mengikuti arahan tokoh agama karena adanya struktur kepatuhan (obedience structure) yang sudah terbentuk secara historis dan kultural. Otoritas kyai dianggap sebagai referensi moral dan kebenaran, sehingga keputusan politik yang mengikuti arahan kyai dipahami sebagai tindakan yang sah secara religius. Indikator perilaku memilih dalam penelitian ini meliputi kecenderungan mengikuti arahan kyai, stabilitas pilihan setelah ada pengaruh kyai, partisipasi dalam kegiatan politik pesantren, dan motivasi religius ketika menentukan calon.

b. Indikator Keputusan dalam memilih santri

Indikator dari keputusan santri terdapat 4 indikator sebagai berikut:

1. Motivasi religius memilih: Tingkat penentuan pilihan santri yang didorong oleh pertimbangan ketaatan, nilai, atau anjuran keagamaan dibandingkan pertimbangan rasional-sekuler.
2. Stabilitas pilihan: Tingkat ketegasan dan konsistensi santri dalam mempertahankan pilihannya sejak awal kampanye hingga hari pencoblosan, diukur dari perubahan niat memilih.
3. Kesesuaian pilihan dengan arahan kyai: Tingkat kesamaan antara pilihan politik akhir santri dengan kandidat/partai yang secara eksplisit atau implisit didukung oleh tokoh agama/kyai mereka.
4. Partisipasi politik santri: Keterlibatan aktif santri dalam tahapan Pemilu, meliputi kesediaan mencoblos (partisipasi elektoral) dan kegiatan politik non-elektoral (misalnya, sosialisasi).

³⁸ Diego Fossati, "What Drives Voting Behavior in Southeast Asia? Evidence from Candidate Choice Experiments in Five Countries", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 44, no. 3 (SAGE Publications Ltd, 2025), pp. 436–60.

4. Faktor-Faktor Moderating santri dalam pilihan politik.

Respons santri terhadap otoritas tokoh agama dalam menentukan pilihan politik tidak bersifat homogen. Heterogenitas latar belakang santri mempengaruhi kuat-lemahnya pengaruh kyai. Beberapa faktor yang relevan adalah:

- 1) Literasi politik santri (Z_1). Literasi politik santri merupakan pengetahuan dan kefahaman santri yang berkaitan dengan segala hal politik. Indikatornya yaitu literasi politik dan kemampuan berpikir kritis. Kefahaman santri terhadap politik dan kemampuan santri dalam berpikir kritis terkait dinamika politik.³⁹
- 2) Orientasi pesantren (Z_2). Orientasi pesantren adalah bagaimana keadaan yang bersangkutan dengan hubungan antara santri dan kyai dalam adanya interaksi sosial. indikatornya adalah Karakteristik pesantren dan pola relasi Karakteristik pondok pesantren dalam hubungan patron-klien antara santri dan kyai.⁴⁰
- 3) Literasi media digital (Z_3). Pengertian literasi media digital adalah kefahaman santri dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital untuk mencari sumber informasi atau untuk menambah wawasan santri. Indikatornya adalah Akses dan kemampuan menggunakan media digital Kemampuan santri dalam menggunakan media digital dalam mencari sumber informasi dan dalam membedakan mana informasi yang hoax atau benar.⁴¹

F. Kerangka Pemikiran Teoritik

Otoritas tokoh keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan santri, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks Pemilu 2024 di Yogyakarta, kyai berperan sebagai figur moral yang memberikan legitimasi terhadap kandidat tertentu. Santri sebagai individu yang memiliki ikatan religius, kultural, dan emosional dengan tokoh agama cenderung mengikuti arahan tersebut.

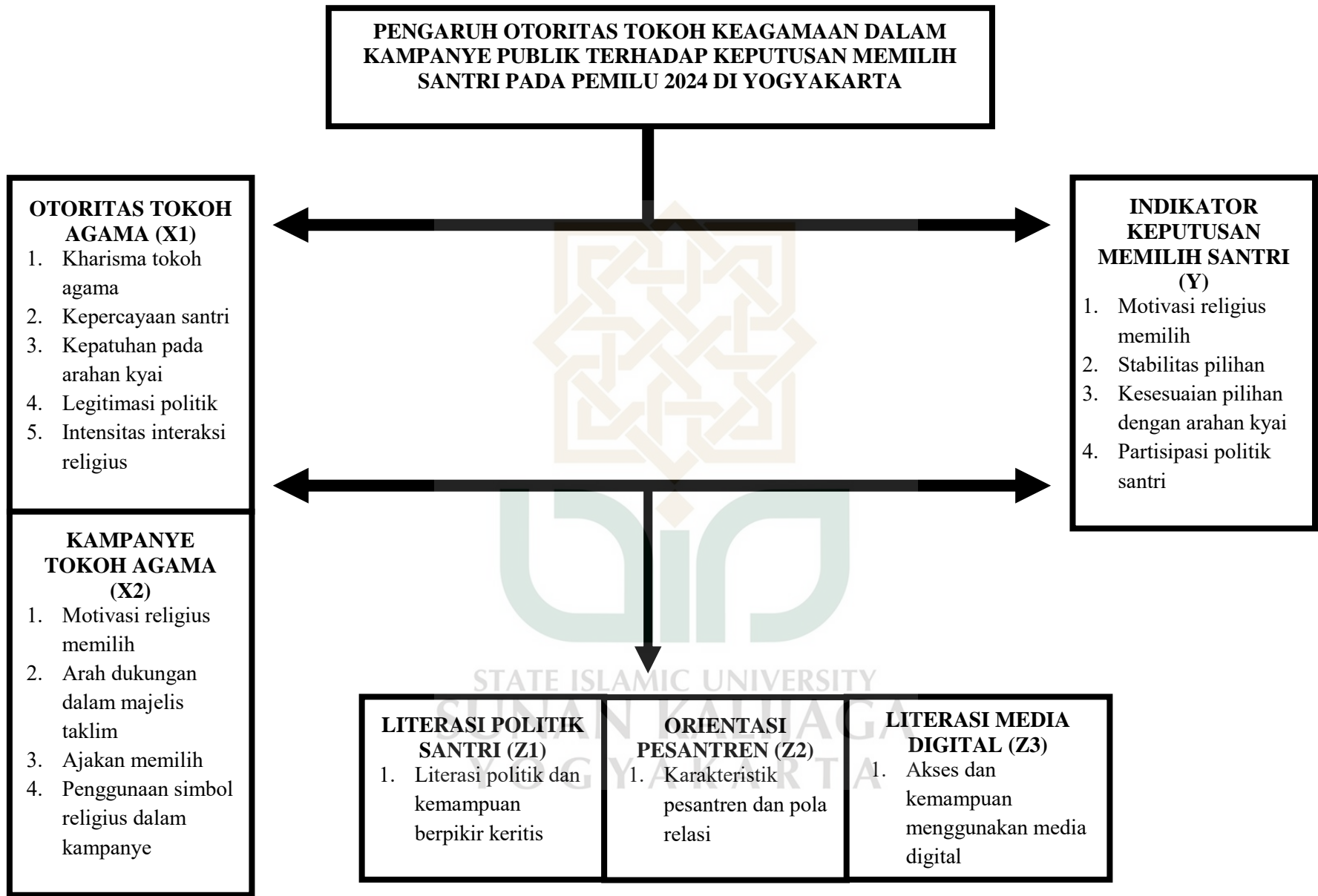
Namun, pengaruh otoritas tokoh agama tidak dirasakan secara sama oleh semua santri. Variasi muncul berdasarkan faktor internal santri seperti tingkat pendidikan, jenis pesantren, usia, dan paparan media digital. Faktor-faktor ini akan membentuk sejauh mana santri menerima, mempertimbangkan, atau mengkritisi arahan politik dari tokoh keagamaan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan otoritas tokoh keagamaan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku memilih santri, dengan karakteristik santri sebagai faktor-faktor yang menjelaskan variasi pengaruh tersebut.

³⁹ Khoiruddin Bashori, "Pendidikan Politik di Era Disrupsi", *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 2 (2018), pp. 287–310.

⁴⁰ Imam Sumantri, "Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul", *Journal of Political Issues*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 134–42.

⁴¹ Mukhlisin Mukhlisin et al., "URGENSI LITERASI DIGITAL BAGI SANTRI MILENIAL DI PONDOK PESANTREN RAHMATUTTHOYIBAH AL IFLAHAH GUNUNG KALER TANGERANG", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, vol. 1, no. 2 (2021), pp. 208–14.



KET: Peta konsep Pemikiran teoritik

G. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran teoritik diatas, penelitian ini dapat ditarik beberapa hipotesis yaitu:

- H1 : $H01$: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara otoritas tokoh agama dengan keputusan memilih santri.
 $Ha1$: Terdapat hubungan yang signifikan antara otoritas tokoh agama dengan keputusan memilih santri.
- H2 : $H02$: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kampanye publik tokoh agama dengan Keputusan memilih santri.
 $Ha2$: Terdapat hubungan yang signifikan antara kampanye publik tokoh agama dengan Keputusan memilih santri.
- H3 : $H03$: Otoritas tokoh agama dan kampanye publik tokoh agama tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih santri.
 $Ha3$: Otoritas tokoh agama dan kampanye publik tokoh agama berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih santri.
- H4 : $H04$: Literasi politik, orientasi pesantren, dan literasi media digital tidak memoderasi secara signifikan pengaruh otoritas tokoh agama dan kampanye publik terhadap keputusan memilih santri.
 $Ha4$: Literasi politik, orientasi pesantren, dan literasi media digital memoderasi secara signifikan pengaruh otoritas tokoh agama dan kampanye publik terhadap keputusan memilih santri.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen otoritas tokoh keagamaan dan kampanye publik tokoh agama terhadap variabel dependen yaitu keputusan memilih santri, serta menguji peran variabel-variabel kontrol seperti tingkat pendidikan, jenis pesantren, usia, dan paparan media digital.

2. Variabel penelitian

a. Variabel Independen (Otoritas Tokoh Agama Dan Kampanye Publik Tokoh Agama)

1. Otoritas Tokoh Keagamaan

Otoritas tokoh keagamaan merupakan salah satu variabel independen utama dalam penelitian ini. Otoritas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan seorang tokoh agama untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat berdasarkan legitimasi keagamaan yang melekat pada dirinya. Menurut Weber (1978), otoritas dapat dibedakan

menjadi tiga tipe, yakni otoritas tradisional, otoritas kharismatik, dan otoritas legal-rasional. Dalam konteks pesantren di Indonesia, otoritas tokoh keagamaan khususnya kiai umumnya bersifat kharismatik sekaligus tradisional, yang dibangun melalui kedalaman ilmu agama, silsilah keilmuan, serta kepercayaan yang mengakar di dalam komunitas santri.⁴²

Otoritas tokoh keagamaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain: (1) tingkat kepercayaan santri terhadap pandangan politik kiai, (2) persepsi santri mengenai kompetensi tokoh agama dalam memberikan arahan politik, (3) derajat kepatuhan santri terhadap anjuran dan rekomendasi kiai, serta (4) pengakuan santri atas legitimasi kiai sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam ranah politik elektoral. Keempat indikator ini merujuk pada konsep otoritas referensial yang dikemukakan oleh French dan Raven (1959), di mana pengaruh seseorang bersumber dari identifikasi dan rasa hormat pengikutnya.⁴³

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional menjadikan kiai memiliki posisi strategis yang tidak sekadar religius, melainkan juga politis. Santri sebagai murid dan pengikut kiai cenderung menginternalisasi nilai-nilai serta preferensi yang disampaikan oleh tokoh agama mereka, termasuk preferensi dalam pemilihan umum. Hal ini menjadikan otoritas tokoh keagamaan sebagai variabel independen yang relevan untuk dikaji pengaruhnya terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024.

2. Kampanye Publik Tokoh Keagamaan

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kampanye publik yang dilakukan oleh tokoh keagamaan. Kampanye publik dalam pengertian ini didefinisikan sebagai serangkaian upaya komunikasi dan persuasi yang dilakukan secara terbuka oleh tokoh agama kepada khalayak, khususnya kepada santri dan masyarakat sekitar pesantren, dengan tujuan mempengaruhi opini dan perilaku politik mereka. Kampanye publik tidak selalu berbentuk kampanye formal dalam pengertian hukum pemilu, melainkan dapat pula berupa ceramah keagamaan, pengajian, tausiyah, atau pernyataan terbuka yang mengandung muatan dukungan atau preferensi politik.

Menurut Nimmo (2000), komunikasi politik yang dilakukan oleh tokoh berpengaruh memiliki efek persuasif yang signifikan karena melibatkan dimensi kepercayaan dan kredibilitas sumber. Dalam hal ini, kampanye publik yang dilakukan oleh tokoh keagamaan memiliki keunggulan dibanding kampanye politik konvensional karena dibalut dalam bingkai moral dan keagamaan yang dianggap memiliki legitimasi tinggi di

⁴² Weber, *Economy and Society*.

⁴³ Barbara Kellerman (ed.), *Political Leadership: A Source Book* (University of Pittsburgh Press, 1986), <http://www.jstor.org/stable/10.2307/jj.12381759>, accessed 28 May 2026.

kalangan santri. Indikator pengukuran variabel ini meliputi: (1) frekuensi tokoh agama menyampaikan pesan politik di ruang publik, (2) kejelasan dukungan yang dinyatakan, (3) jangkauan pesan yang disampaikan melalui berbagai media, serta (4) intensitas interaksi antara tokoh agama dan santri dalam konteks politik.⁴⁴

Kampanye publik tokoh keagamaan pada Pemilu 2024 di Yogyakarta menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat adanya dinamika politik yang cukup kompleks, termasuk polarisasi pilihan politik di kalangan umat Islam. Keterlibatan kiai dan ulama dalam kampanye publik baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan persinggungan antara otoritas keagamaan dengan kepentingan politik elektoral yang semakin menguat di era demokrasi kontemporer Indonesia.

b. Variabel Dependen (Keputusan Memilih Santri)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan memilih (voting decision) merupakan tindakan akhir dari sebuah proses psikologis dan sosial yang kompleks, di mana seorang individu menentukan pilihannya terhadap kandidat atau partai politik tertentu dalam suatu pemilihan umum. Dalam perspektif perilaku memilih (voting behavior), terdapat tiga pendekatan utama yang lazim digunakan, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh Lazarsfeld et al. (1944) menekankan bahwa keputusan memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti agama, kelas sosial, dan afiliasi kelompok. Dalam konteks santri, pendekatan ini sangat relevan mengingat kehidupan pesantren yang komunal dan hierarkis menciptakan tekanan sosial yang kuat dalam pembentukan preferensi politik⁴⁵. Sementara itu, pendekatan psikologis dari Campbell et al. (1960) menekankan peran identifikasi partai dan kedekatan afektif dengan kandidat sebagai penentu utama keputusan memilih.⁴⁶

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel keputusan memilih santri dalam penelitian ini meliputi: (1) kesesuaian pilihan santri dengan rekomendasi tokoh agama, (2) konsistensi pilihan sebelum dan sesudah mendapatkan pesan dari tokoh agama, (3) alasan yang mendasari pilihan politik santri, serta (4) tingkat kemantapan dan keyakinan santri atas pilihan yang telah dibuat. Pengukuran dilakukan melalui instrumen kuesioner dengan skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

⁴⁴ Dan D. Nimmo, *Komunikasi politik: komunikator, pesan dan media* (Remadja Karya, 1989).

⁴⁵ Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet, *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (Columbia University Press, 1948).

⁴⁶ Angus Campbell and University of Michigan Survey Research Center, *The American Voter* (University of Chicago Press, 1980).

c. Variabel Moderating (Literasi politik santri, Orientasi pesantren, dan Literasi media digital)

1. Literasi Politik Santri

Variabel moderating pertama dalam penelitian ini adalah literasi politik santri. Literasi politik didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami sistem politik, proses demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan pesan-pesan politik secara kritis. Menurut Cassel dan Celia (1997), literasi politik mencakup tiga dimensi utama, yakni pengetahuan politik (*political knowledge*), keterampilan politik (*political skills*), dan sikap atau nilai-nilai demokratis (*political attitudes and values*).⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, literasi politik santri diduga berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara otoritas tokoh keagamaan dan kampanye publik terhadap keputusan memilih. Santri dengan tingkat literasi politik yang tinggi diperkirakan lebih mampu melakukan evaluasi kritis terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan oleh tokoh agama, sehingga pengaruh otoritas keagamaan terhadap pilihan politik mereka relatif lebih lemah. Sebaliknya, santri dengan literasi politik yang rendah cenderung lebih rentan terhadap pengaruh tokoh agama dalam pengambilan keputusan memilih.

Pengukuran literasi politik santri dalam penelitian ini mengacu pada indikator: (1) pemahaman tentang sistem pemilu dan mekanisme demokrasi, (2) kemampuan mengidentifikasi platform dan visi-misi kandidat secara mandiri, (3) kesadaran akan hak pilih sebagai hak individual yang bebas dari tekanan, serta (4) kemampuan menilai informasi politik secara objektif dan berimbang.

2. Orientasi Pesantren

Variabel moderating kedua adalah orientasi pesantren, yang merujuk pada kecenderungan kelembagaan pesantren dalam menyikapi dinamika politik dan pemilihan umum. Pesantren di Indonesia memiliki corak dan orientasi yang beragam, mulai dari pesantren yang cenderung apolitis dan menekankan pendidikan keagamaan murni, hingga pesantren yang secara aktif terlibat dalam jaringan politik tertentu dan mendukung kandidat atau partai secara terbuka. Perbedaan orientasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain afiliasi organisasi keagamaan (seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah), latar belakang ideologis kiai pengasuh, serta sejarah dan tradisi pesantren yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, orientasi pesantren diduga memoderasi pengaruh otoritas tokoh agama terhadap keputusan memilih santri. Pesantren yang berorientasi politik aktif

⁴⁷ Carol A. Cassel and Celia C. Lo, "Theories of Political Literacy", *Political Behavior*, vol. 19, no. 4 (1997), pp. 317–35.

diperkirakan akan memperkuat pengaruh kiai terhadap pilihan politik santri, karena nilai-nilai politik dan preferensi elektoral menjadi bagian dari kultur yang diinternalisasi dalam kehidupan pesantren. Sebaliknya, pesantren yang berorientasi non-politik atau mandiri secara elektoral diperkirakan akan memperlemah pengaruh tersebut, karena santri didorong untuk mengambil keputusan politik secara lebih otonom.⁴⁸

Indikator pengukuran orientasi pesantren dalam penelitian ini mencakup: (1) adanya keterlibatan pesantren dalam jaringan atau tim sukses kandidat tertentu, (2) sikap kelembagaan pesantren terhadap kegiatan kampanye di lingkungan pondok, (3) adanya anjuran resmi pesantren terkait pilihan politik, serta (4) persepsi santri mengenai keberpihakan politik lembaga pesantren tempat mereka belajar.

3. Literasi Media Digital

Variabel moderating ketiga adalah literasi media digital santri. Literasi media digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten melalui media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam era informasi saat ini, media digital termasuk platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan WhatsApp menjadi salah satu saluran utama penyebaran pesan-pesan politik, termasuk pesan dari tokoh keagamaan. Kemampuan santri dalam menggunakan dan menyaring informasi dari media digital menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi sejauh mana pesan politik dari kiai berdampak pada keputusan memilih mereka.

Menurut Hobbs (2010), literasi media digital mencakup kemampuan untuk memahami konteks produksi pesan, mengidentifikasi bias dan kepentingan di balik suatu konten, serta mampu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dalam konteks politik elektoral, santri yang memiliki literasi media digital tinggi mampu membedakan antara konten kampanye politik dan konten keagamaan yang murni, serta lebih kritis dalam menyikapi endorsemen politik yang disampaikan melalui platform digital.⁴⁹

Variabel ini diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: (1) kemampuan santri dalam mengidentifikasi berita hoaks dan disinformasi politik, (2) intensitas penggunaan platform media digital untuk mengakses informasi pemilu, (3) kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi politik di media digital, serta (4) kesadaran santri akan potensi manipulasi opini melalui konten digital. Santri yang memiliki literasi media digital tinggi diperkirakan akan lebih mandiri dalam menentukan pilihan politiknya, sehingga

⁴⁸ Ernas, "Bias Politik Pesantren".

⁴⁹ Renee Hobbs, *Digital and media literacy: a plan of action : a white paper on the digital and media literacy recommendations of the Knight Commission on the information needs of communities in a democracy* (Washington, D.C.: Aspen Institute, 2010).

pengaruh tokoh keagamaan terhadap keputusan memilih mereka akan relatif lebih lemah dibandingkan santri dengan literasi media digital rendah.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas pada setiap variabel.

Tabel 1.1 Definisi operasional

NO	Variabel	Indikator	Definisi operasional
1	Otoritas Tokoh Keagamaan (X)	1. Kharisma tokoh agama	Tingkat pengakuan dan penghormatan emosional santri terhadap keunggulan spiritual, moral, atau intelektual tokoh agama, diukur melalui penilaian subjektif santri.
		2. Kepercayaan santri	Tingkat keyakinan santri terhadap integritas, kejujuran, dan kebenaran ajaran/arahan tokoh agama yang menjadi dasar penerimaan informasi atau arahan.
		3. Kepatuhan pada arahan kyai	Kecenderungan santri untuk mengikuti atau menuruti nasihat, anjuran, atau instruksi politik yang diberikan oleh kyai/tokoh agama, diukur dari kemauan bertindak.
		4. Legitimasi politik	Pengakuan santri bahwa tokoh agama memiliki hak dan wewenang moral untuk terlibat dan memberikan arahan dalam urusan politik praktis atau Pemilu.
		5. Intensitas interaksi religius	Frekuensi dan kualitas interaksi santri dengan tokoh agama

			dalam konteks ritual, pengajian, atau kegiatan keagamaan non-formal di lingkungan pesantren.
2	Kampanye Publik Tokoh Agama (X ₂)	1. Motivasi religius memilih	Persepsi santri bahwa tindakan memilih (calon tertentu) adalah bagian dari kewajiban atau anjuran agama yang didapatkan dari arahan tokoh agama.
		2. Arah dukungan dalam majelis taklim	Frekuensi penyampaian atau penyebutan dukungan politik kepada kandidat/partai tertentu oleh tokoh agama selama sesi pengajian atau majelis taklim.
		3. Ajakan memilih	Tingkat penerimaan santri terhadap pesan eksplisit atau implisit dari tokoh agama yang menganjurkan atau mengarahkan pemilihan kandidat tertentu.
		4. Penggunaan simbol religius dalam kampanye	Persepsi santri terhadap frekuensi penggunaan atribut, istilah, atau referensi keagamaan oleh tokoh agama saat mendukung kandidat di ruang publik.
3	Keputusan Memilih Santri (Y)	1. Motivasi religius memilih	Tingkat penentuan pilihan santri yang didorong oleh pertimbangan ketaatan, nilai, atau anjuran keagamaan dibandingkan pertimbangan rasional-sekuler.
		2. Stabilitas pilihan	Tingkat ketegasan dan konsistensi santri dalam mempertahankan pilihannya

			sejak awal kampanye hingga hari pencoblosan, diukur dari perubahan niat memilih.
		3. Kesesuaian pilihan dengan arahan kyai	Tingkat kesamaan antara pilihan politik akhir santri dengan kandidat/partai yang secara eksplisit atau implisit didukung oleh tokoh agama/kyai mereka.
		4. Partisipasi politik santri	Keterlibatan aktif santri dalam tahapan Pemilu, meliputi kesediaan mencoblos (partisipasi elektoral) dan kegiatan politik non-elektoral (misalnya, sosialisasi).
4	Literasi politik santri (Z_1)	1. Literasi politik dan kemampuan berpikir kritis	Kefahaman santri terhadap politik dan kemampuan santri dalam berpikir kritis terkait dinamika politik.
5	Orientasi pesantren (Z_2)	1. Karakteristik pesantren dan pola relasi	Karakteristik pondok pesantren dalam hubungan patron-klien antara santri dan kyai
6	Literasi media digital (Z_3)	1. Akses dan kemampuan menggunakan media digital	Kemampuan santri dalam menggunakan media digital dalam mencari sumber informasi dan dalam membedakan mana informasi yang hoax atau benar.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian tentang “Pengaruh Ototritas Tokoh Keagamaan Dalam Kampanye Publik Terhadap Keputusan Memilih Santri Pada Pemilu 2024 Di Yogyakarta” ini berlokasi di Yogyakarta. Lokasi Yogyakarta dipilih karena terdapat keunikan dan kekhususan dalam struktur masyarakat yang kompleks yang mana tradisi keagamaan bercampur dengan tradisi

budaya lokal Jawa yang mana itu akan sangat mempengaruhi setiap tindakan dan pilihan masyarakat dalam kehidupan terutama dalam hal politik

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang sedang aktif belajar dan berdomisili di pondok pesantren yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada periode Pemilu 2024. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa santri merupakan segmen pemilih yang memiliki ikatan struktural, kultural, dan emosional yang kuat dengan tokoh keagamaan (kyai/ustadz), sehingga sangat relevan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan politik mereka. DIY dipilih sebagai wilayah penelitian karena memiliki karakteristik unik sebagai pusat pendidikan Islam dengan jumlah pesantren yang cukup besar, baik yang bersifat salafiyah maupun modern, serta adanya interaksi antara tradisi keagamaan dengan tradisi intelektual akademik yang membentuk keragaman pandangan politik di kalangan santri.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sebagian dari populasi guna mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah gabungan antara purposive sampling dan cluster random sampling. Purposive sampling diterapkan pada tahap pertama untuk memilih kategori pesantren yang representatif, yaitu pesantren salafiyah dan pesantren modern di DIY, guna memastikan keterwakilan variasi jenis pesantren yang menjadi salah satu variabel moderasi dalam penelitian ini. Setelah kategori ditentukan, cluster random sampling digunakan untuk memilih secara acak pesantren-pesantren dalam setiap kategori, kemudian dari pesantren yang terpilih diambil responden secara proporsional. Pendekatan kombinasi ini dipilih karena populasi santri di DIY tersebar dalam kluster-kluster institusi (pesantren), sehingga sampling berbasis kluster lebih efisien dan mampu menjangkau variasi konteks sosial yang memadai untuk keperluan analisis regresi berganda dan MRA.

c. Ukuran Sample

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cochran dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 5%. Rumus Cochran adalah sebagai berikut:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

Keterangan:

n_0 = Jumlah sampel yang dibutuhkan

Z = Nilai Z pada tingkat kepercayaan 95% = 1,96

p = Proporsi populasi yang diperkirakan memiliki karakteristik tertentu = 0,5
(digunakan karena proporsi tidak diketahui, sehingga menghasilkan ukuran sampel maksimum)

q = 1 - p = 0,5

e = Batas toleransi kesalahan (margin of error) = 0,05

Rumus Cochran umumnya digunakan ketika ukuran populasi sangat besar atau tidak diketahui secara pasti, sehingga penentuan sampel didasarkan pada proporsi dan tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Apabila ukuran populasi (N) diketahui dan tergolong terbatas, hasil perhitungan n_0 dapat dikoreksi menggunakan rumus finit berikut:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}}$$

Selain mempertimbangkan formula Cochran, penentuan ukuran sampel juga memperhatikan kebutuhan analisis statistik yang digunakan, khususnya regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dalam analisis regresi berganda, jumlah sampel minimum yang direkomendasikan adalah 10 kali jumlah variabel prediktor yang digunakan, atau minimal 100 responden agar model memiliki kekuatan statistik (*statistical power*) yang memadai. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya data yang tidak lengkap atau gugur dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menambahkan cadangan sampel sebesar 10% dari hasil kalkulasi formula Cochran, sehingga diperoleh jumlah sampel akhir yang mencukupi untuk keperluan analisis.⁵⁰

6. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu responden (santri), melalui instrumen kuesioner yang telah disusun peneliti. Data primer ini mencakup: (1) penilaian santri terhadap otoritas tokoh keagamaan (X_1); (2) persepsi santri

⁵⁰ Prof Sugiyono, "Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", *Alfabeta, Bandung*, vol. 62 (2011), p. 70.

terhadap kampanye publik tokoh agama (X_2); (3) keputusan memilih santri dalam Pemilu 2024 (Y); serta (4) data variabel moderasi (Z) yang mencakup literasi politik (Z_1), orientasi pesantren (Z_2), dan literasi media digital (Z_3). Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, literatur akademik, data statistik pesantren di DIY, laporan hasil Pemilu 2024 di Yogyakarta, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat konteks teoritis, menyusun kerangka konseptual, dan memperkaya analisis pembahasan.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah survei dengan instrumen kuesioner terstruktur (structured questionnaire). Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari setiap variabel penelitian. Kuesioner disebar kepada responden secara langsung (self-administered questionnaire) di lingkungan pesantren yang terpilih sebagai lokasi penelitian, dengan bantuan pengurus atau pihak manajemen pesantren untuk memudahkan akses ke responden. Sebelum penyebaran kuesioner secara penuh (full survey), terlebih dahulu dilakukan uji coba (pilot test) kepada 30 responden dari pesantren yang tidak termasuk dalam sampel penelitian, guna mengevaluasi keterbacaan, kejelasan, dan kualitas psikometrik item pernyataan. Hasil pilot test digunakan sebagai dasar penyempurnaan instrumen sebelum digunakan secara resmi.

Pengumpulan data kuesioner penelitian ini menggunakan dua cara yaitu, menggunakan google form dan formulir. pengambilan data dilakukan mulai tanggal 8 Januari 2026 sampai 30 April 2026. Melalui proses tersebut maka terkumpul data responden sebanyak 175 responden dari berbagai santri yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah reponden tersebut maka data dapat dianggap terpenuhi untuk dilanjutkan ketahap analisis.

c. Teknik Skala Pengukuran

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan lima pilihan jawaban yang bersifat ordinal, yaitu:

Alternatif Jawaban	Kode
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3

Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala Likert dipilih karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang mencerminkan indikator dari masing-masing variabel. Setiap variabel baik variabel independen (X_1 , X_2), variabel dependen (Y), maupun variabel moderasi (Z_1 – Z_3) dioperasionalkan ke dalam sejumlah butir pernyataan yang disusun berdasarkan definisi operasional dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total masing-masing variabel yang akan digunakan dalam analisis statistik.⁵¹

Instrumen penelitian ini disebarkan dalam bentuk angket kuesioner penelitian. Kuesioner tersebut disebarkan melalui google form dan formulir cetak yang akan diberikan kepada responden yang memenuhi karakteristik tersebut. Angket ini akan membuat beberapa variabel, yaitu otoritas tokoh agama (X_1), kampanye publik tokoh agama (X_2), keputusan memilih santri (Y), dan variabel Literasi politik santri (Z_1), Orientasi pesantren (Z_2), dan Literasi media digital (Z_3). Semua variabel dari instrumen penelitian tersebut disusun dalam bentuk tabel berikut:

NO	INDIKATOR	NOMOR ITEM	JUMLAH
1	Kharisma tokoh agama	1-3	3
2	Kepercayaan santri	4-6	3
3	Kepatuhan pada arahan kyai	7-9	3
4	Legitimasi politik	10-12	3
5	Intensitas interaksi religius	13-15	3
6	Motivasi religius memilih	16-18	3
7	Arah dukungan dalam majelis taklim	19-21	3
8	Ajakan memilih	22-24	3
9	Penggunaan simbol religius dalam kampanye	25-27	3
10	Motivasi religius memilih	28-30	3
11	Stabilitas pilihan	31-33	3

⁵¹ Rensis Likert, *A Technique for the Measurement of Attitudes* (Columbia university, 1932).

12	Kesesuaian pilihan dengan arahan kyai	34-36	3
13	Partisipasi politik santri	37-39	3
14	Literasi politik dan kemampuan berpikir keritis	40-42	3
15	Karakteristik pesantren dan pola relasi	43-45	3
16	Akses dan kemampuan menggunakan media digital	46-48	3

d. Uji Instrumen

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data yang sesungguhnya, seluruh instrumen penelitian terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui dua jenis pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid) dan menghasilkan hasil yang konsisten apabila diulang (reliabel). Uji data tersebut menggunakan bantuan aplikasi software penelitian kuantitatif yang bernama JAMOVI.

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk atau variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor masing-masing butir pernyataan dengan skor total instrumen. Rumus korelasi Product Moment Pearson yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan y (koefisien validitas)

n = Jumlah responden/sampel uji coba

$\sum x$ = Jumlah skor butir pernyataan

$\sum y$ = Jumlah skor total instrumen

$\sum xy$ = Jumlah hasil perkalian antara skor butir dan skor total

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor butir

Σy^2 = Jumlah kuadrat skor total

Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: apabila nilai r hitung (r_{xy}) lebih besar dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% ($df = n - 2$), maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengumpulan data. Sebaliknya, apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid dan harus diperbaiki atau dieliminasi. Dalam praktik pengolahan data, uji validitas ini dilakukan menggunakan bantuan software Jamovi dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation pada output Reliability Statistics.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keandalan instrumen dalam menghasilkan data yang stabil apabila instrumen tersebut digunakan secara berulang pada objek yang sama atau dalam kondisi yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cronbach's Alpha (α), karena metode ini sesuai untuk instrumen yang menggunakan skala Likert berpilihan lebih dari dua (politomi). Rumus Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = Koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha

k = Jumlah butir pernyataan dalam instrumen

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah varians skor tiap butir pernyataan

σ_t^2 = Varians total skor instrumen

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien Alpha (α) $\geq 0,60$ (George & Mallery, 2003). Sebagai panduan interpretasi nilai Alpha: $r_{11} < 0,60 = tidak\ reliabel$; $0,60 \leq \alpha < 0,70 = cukup\ reliabel$; $0,70 \leq \alpha < 0,80 = reliabel$; $0,80 \leq \alpha < 0,90 = sangat\ reliabel$; $\alpha \geq 0,90 = sempurna$. Nilai Alpha mendekati 1,00 menunjukkan tingkat reliabilitas yang semakin tinggi. Uji reliabilitas dilakukan pada seluruh butir yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik kuantitatif yang dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik,

analisis hubungan dan pengaruh, uji hipotesis, hingga uji koefisien determinasi dan Moderated Regression Analysis (MRA). Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan software JAMOVl.

1. Analisis Deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan langkah pertama dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi jawaban pada setiap variabel penelitian. Analisis ini menyajikan ukuran-ukuran statistik dasar seperti frekuensi (f), persentase (%), nilai rata-rata (mean/\bar{x}), nilai tengah (median), nilai yang paling sering muncul (modus), dan standar deviasi (SD) untuk mendeskripsikan profil santri sebagai responden, serta kecenderungan penilaian mereka terhadap variabel otoritas tokoh keagamaan (X_1), kampanye publik tokoh agama (X_2), keputusan memilih santri (Y), dan variabel moderasi (Z_1 – Z_3). Hasil analisis deskriptif ini penting untuk memberikan konteks awal dan pemahaman dasar tentang data sebelum masuk ke tahap pengujian hipotesis yang lebih kompleks. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi data pencilan (outlier) atau distribusi yang sangat menceng (skewed) yang dapat mempengaruhi hasil analisis inferensial.

2. Uji Asumsi Classic

Sebelum melakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan serangkaian uji asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi persyaratan statistik sehingga menghasilkan estimasi yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) sesuai dengan Teorema Gauss-Markov. Terdapat empat uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual (nilai sisa) dari model regresi berdistribusi normal. Asumsi normalitas residual diperlukan agar pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F memiliki validitas yang dapat dipercaya, terutama pada sampel berukuran kecil hingga sedang. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Statistik uji Kolmogorov-Smirnov dihitung dengan rumus:

$$D = \max|F_o(x) - F_e(x)|$$

Keterangan:

D = Nilai statistik Kolmogorov-Smirnov (nilai deviasi maksimum)

$F_o(X_i)$ = Fungsi distribusi kumulatif teoritis (distribusi normal)

$S_n(X_i)$ = Fungsi distribusi kumulatif empiris dari data sampel

Kriteria pengujian: apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya, apabila Sig. ≤ 0,05, maka distribusi residual tidak normal dan perlu dilakukan transformasi data atau penggunaan metode robust. Selain uji K-S, peneliti juga menggunakan visualisasi Normal P-P Plot untuk memeriksa kenormalan distribusi residual secara grafis.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat (korelasi tinggi) di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan standar error yang sangat besar, sehingga uji t menjadi tidak valid. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Rumus VIF adalah:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}} = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Keterangan:

VIF = Variance Inflation Factor

$Tolerance$ = Nilai toleransi = $1 - R_j^2$

R_j^2 = Koefisien determinasi dari regresi variabel X_j terhadap variabel X lainnya

Kriteria pengujian: apabila nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ untuk semua variabel independen, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Apabila $VIF \geq 10$ atau $Tolerance \leq 0,1$, maka terdapat indikasi multikolinearitas yang serius dan perlu ditangani, misalnya dengan menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi atau menggunakan metode ridge regression.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastis) untuk setiap nilai prediktor. Jika varians residual tidak konstan (heteroskedastis), maka estimasi OLS (Ordinary Least Squares) masih tidak bias tetapi tidak lagi efisien (tidak BLUE), dan uji signifikansi t

maupun F menjadi tidak valid. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen:

$$|e_i| = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$|e_i|$ = Nilai absolut residual dari model regresi utama

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel independen

X_i = Nilai variabel independen ke-i

ε_i = Error term pada model Glejser

Kriteria pengujian: apabila nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen dalam persamaan Glejser $> 0,05$, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastis). Sebaliknya, apabila Sig. $\leq 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas. Selain uji Glejser, peneliti juga menggunakan Scatterplot antara nilai residual yang distandarisasi (*ZRESID) dengan nilai prediksi yang distandarisasi (*ZPRED) untuk mengidentifikasi pola heteroskedastisitas secara visual.

4) Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa hubungan antara masing-masing variabel independen (X_1, X_2) dan variabel moderasi (Z_1-Z_3) dengan variabel dependen (Y) bersifat linear. Asumsi linearitas merupakan syarat dasar dalam analisis regresi linear, karena model regresi diasumsikan menggambarkan hubungan yang proporsional antara prediktor dan kriteria. Uji linearitas menggunakan Test for Linearity melalui ANOVA dengan membandingkan komponen penyimpangan dari linearitas (Deviation from Linearity). Statistik F yang digunakan adalah:

$$F = \frac{MS_{Regression}}{MS_{Residual}}$$

Keterangan:

F = Nilai statistik F untuk uji linearitas

$MS Regression$ = Mean Square dari komponen regresi linear

$MS Residual$ = Mean Square dari sisa (residual)

Kriteria pengujian: apabila nilai signifikansi pada baris Linearity dalam tabel ANOVA $< 0,05$, maka hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Sebaliknya, apabila nilai Sig. pada baris Deviation from Linearity $> 0,05$, maka asumsi linearitas terpenuhi dan model regresi linear dapat digunakan. Dengan kata lain, kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa model linear adalah representasi yang tepat dari hubungan antar variabel.

3. Analisis Hubungan dan Pengaruh.

1) Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan (strength) dan arah (direction) hubungan antara dua variabel secara bivariat, yaitu antara: (a) otoritas tokoh keagamaan (X_1) dengan keputusan memilih santri (Y); dan (b) kampanye publik tokoh agama (X_2) dengan keputusan memilih santri (Y). Teknik yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y

n = Jumlah responden

$\sum xy$ = Jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y

$\sum x$ = Jumlah skor variabel X

$\sum y$ = Jumlah skor variabel Y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor X

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor Y

Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara -1 hingga $+1$. Nilai r mendekati $+1$ menunjukkan hubungan positif yang kuat; nilai r mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat; dan $r = 0$ menunjukkan tidak ada hubungan linear. Interpretasi kekuatan korelasi mengacu pada pedoman berikut: $0,00-0,19 = \text{sangat lemah}$; $0,20-0,39 = \text{lemah}$; $0,40-0,59 = \text{sedang}$; $0,60-0,79 = \text{kuat}$; $0,80-1,00 = \text{sangat kuat}$

(Sugiyono, 2019). Signifikansi korelasi diuji dengan membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel pada $df = n - 2$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

2) Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh X_1 (Otoritas Tokoh Keagamaan) dan X_2 (Kampanye Publik Tokoh Agama) terhadap Y (Keputusan Memilih Santri), dengan mengontrol variabel-variabel moderasi Z (Literasi Politik, Orientasi Pesantren, Literasi Media Digital). Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 Z_2 + \beta_5 Z_3 + \beta_6 (X_1 Z_1) + \beta_7 (X_1 Z_2) + \beta_8 (X_1 Z_3) + \beta_9 (X_2 Z_1) + \beta_{10} (X_2 Z_2) + \beta_{11} (X_2 Z_3) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Keputusan Memilih Santri)

β_0 = Konstanta (intercept), nilai Y ketika seluruh $X = 0$

β_1 = Koefisien regresi X_1 (Otoritas Tokoh Keagamaan)

β_2 = Koefisien regresi X_2 (Kampanye Publik Tokoh Agama)

β_3 = Koefisien regresi Z_1 (Literasi Politik)

β_4 = Koefisien regresi Z_2 (Orientasi Pesantren)

β_5 = Koefisien regresi Z_3 (Literasi Media Digital)

ε = Error term (kesalahan pengukuran)

Koefisien regresi (β) diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan prediksi. Koefisien β yang dihasilkan merepresentasikan besarnya perubahan Y untuk setiap perubahan satu unit pada variabel prediktor yang bersangkutan, dengan menganggap variabel prediktor lainnya konstan (*ceteris paribus*).

4. Uji Hipotesis

1) Uji T Parsial (Uji T)

Uji t parsial digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (X_1 dan X_2) secara individual terhadap variabel dependen (Y), dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji t parsial menjawab

pertanyaan: apakah koefisien regresi β_i secara statistik berbeda secara signifikan dari nol? Statistik uji t dihitung dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

Keterangan:

t = Nilai statistik t hitung

β_i = Koefisien regresi variabel independen ke- i

$SE(\beta_i)$ = Standard Error dari koefisien regresi β_i

Nilai t hitung kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan $df = n - k - 1$ (di mana k adalah jumlah variabel prediktor) dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (dua sisi/two-tailed). Kriteria pengujian: apabila $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$ atau nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y . Sebaliknya, apabila $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel}$ atau Sig. $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Uji T ini digunakan untuk menjawab Hipotesis 1 penelitian (H_{a1} dan H_{o1}).

2) Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen (X_1, X_2) dan variabel kontrol/moderasi (Z_1-Z_3) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji F pada dasarnya menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Statistik uji F dihitung menggunakan rumus:

$$F = \frac{SSR/k}{SSE/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F = Nilai statistik F hitung

SSR = Sum of Squares Regression (jumlah kuadrat regresi)

SSE = Sum of Squares Error (jumlah kuadrat kesalahan/residual)

k = Jumlah variabel independen/prediktor dalam model

n = Jumlah observasi/responden

$n - k - 1$ = Derajat kebebasan (degree of freedom) untuk error

Nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel pada df pembilang = k dan df penyebut = n – k – 1, pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian: apabila F hitung > F tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga model regresi layak (fit) digunakan. Uji F ini digunakan untuk menjawab Hipotesis 2 penelitian (H_{a2} dan H_{o2}).

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran goodness of fit dari model regresi yang menunjukkan proporsi (persentase) variasi dalam variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama. Nilai R^2 dihitung dengan rumus:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

SSR = Sum of Squares Regression (variasi yang dijelaskan model)

SST = Sum of Squares Total (total variasi dalam Y)

SSE = Sum of Squares Error (variasi yang tidak dijelaskan model)

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel prediktor dalam model kurang mampu menjelaskan variasi Y, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel prediktor sangat kuat dalam menjelaskan variasi Y. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Adjusted R^2 (R^2 terkoreksi) yang lebih tepat untuk model dengan beberapa prediktor, karena nilai Adjusted R^2 telah dikoreksi berdasarkan jumlah prediktor dan ukuran sampel, sehingga tidak akan selalu meningkat hanya karena penambahan variabel baru. Rumus Adjusted R^2 adalah:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah observasi/responden

k = Jumlah variabel independen/prediktor dalam model

Interpretasi nilai Adjusted R^2 dalam penelitian ini menggunakan pedoman: 0% – 19% = sangat lemah; 20% – 39% = lemah; 40% – 59% = cukup; 60% – 79% = kuat; 80% – 100% = sangat kuat dalam menjelaskan variasi keputusan memilih santri.

6. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel (variabel moderasi) memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, MRA digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel karakteristik santri (Z_1 = Literasi Politik, Z_2 = Orientasi Pesantren, Z_3 = Literasi Media Digital) memoderasi hubungan antara otoritas tokoh keagamaan (X_1) dan kampanye publik tokoh agama (X_2) terhadap keputusan memilih santri (Y). Persamaan MRA yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 Z_2 + \beta_5 Z_3 + \beta_6 (X_1 Z_1) + \beta_7 (X_1 Z_2) + \beta_8 (X_1 Z_3) + \beta_9 (X_2 Z_1) + \beta_{10} (X_2 Z_2) + \beta_{11} (X_2 Z_3) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Keputusan Memilih Santri)

X_i = Variabel independen (Otoritas Tokoh Keagamaan atau Kampanye Publik)

Z = Variabel moderasi (Z_1 , Z_2 , atau Z_3)

$X_i \cdot Z$ = Interaction term: perkalian antara variabel independen dan variabel moderasi

β_3 = Koefisien regresi interaction term (koefisien moderasi)

ε = Error term

Pengujian efek moderasi dilakukan dengan memasukkan interaction term (perkalian antara variabel independen X dengan variabel moderasi Z) ke dalam model regresi. Prosedur MRA dilakukan dalam tiga langkah: Langkah 1 – meregresikan X_1 (atau X_2) terhadap Y untuk mendapatkan baseline model; Langkah 2 – memasukkan variabel moderasi Z ke dalam model; Langkah 3 – memasukkan interaction term ($X \cdot Z$) ke dalam model dan mengamati perubahan R^2 (ΔR^2) serta signifikansi koefisien interaksi β_3 .

Kriteria pengujian MRA: apabila koefisien interaction term (β_3) signifikan pada Sig. < 0,05, maka variabel Z terbukti memoderasi hubungan antara X dan Y . Apabila β_3 positif dan signifikan, maka Z memperkuat (mempererat) hubungan X terhadap Y .

Sebaliknya, apabila β_3 negatif dan signifikan, maka Z memperlemah hubungan tersebut. Untuk menghindari masalah multikolinearitas antara variabel X, Z, dan interaction term X·Z, masing-masing variabel terlebih dahulu distandarisasi (mean centering) sebelum membentuk interaction term. MRA ini menjadi alat kunci untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi pengaruh otoritas tokoh keagamaan terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian secara terstruktur. Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan istilah yang digunakan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya mengkaji pengaruh otoritas tokoh keagamaan dan kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024.

Bab II Kajian Teoritik memuat penjelasan mengenai teori-teori yang relevan, antara lain: teori otoritas (Max Weber), teori perilaku memilih (political behavior), komunikasi politik tokoh agama, serta teori sosial pesantren. Bab ini juga menyajikan definisi konseptual, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritik yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data seperti uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis statistik mengenai pengaruh otoritas tokoh agama dan kampanye publik terhadap keputusan memilih santri, interpretasi hasil regresi, serta pembahasan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait, baik bagi pesantren, tokoh agama, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian mengenai perilaku politik santri.

⁵² Reuben M. Baron and David A. Kenny, "The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations", *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 51, no. 6 (US: American Psychological Association, 1986), pp. 1173–82.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri pada Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut besaran pengaruhnya dan faktor-faktor yang memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data dari 175 santri, uji asumsi klasik, analisis korelasi, regresi linear berganda, hingga *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh kesimpulan yang dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah sebagai berikut.

1. Terdapat Pengaruh yang Signifikan antara Otoritas Tokoh Keagamaan dalam Kampanye Publik terhadap Keputusan Memilih Santri pada Pemilu 2024 di DIY

Rumusan masalah pertama dijawab secara afirmatif oleh data empiris. Hasil uji koefisien korelasi Pearson menunjukkan bahwa Otoritas Tokoh Keagamaan (X1) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Keputusan Memilih Santri (Y) dengan nilai $r = 0,420$ ($p < 0,001$), masuk dalam kategori korelasi sedang. Sementara itu, Kampanye Publik Tokoh Keagamaan (X2) memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan dengan Y, yakni $r = 0,755$ ($p < 0,001$), masuk kategori korelasi kuat. Kedua variabel ini secara bivariat terbukti berhubungan bermakna dengan keputusan memilih santri.

Secara parsial dalam model regresi berganda, X2 (Kampanye Publik) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Y dengan koefisien $b = 0,622$ dan $t = 12,820$ ($p < 0,001$). Adapun X1 (Otoritas) secara parsial tidak signifikan ($b = 0,089$, $p = 0,068$) ketika dikontrol oleh X2, yang mengindikasikan bahwa pengaruh otoritas kiai bekerja secara dimediasi oleh tindakan kampanye publik yang dilakukannya bukan melalui jalur langsung yang independen. Otoritas berfungsi sebagai kapital simbolik (Bourdieu, 1991) yang dikonversi menjadi pengaruh elektoral aktual melalui mekanisme kampanye publik. Kesimpulan ini menegaskan bahwa terdapat pengaruh yang nyata, signifikan, dan terukur antara otoritas tokoh keagamaan dalam kampanye publik terhadap keputusan memilih santri, sehingga hipotesis Ha1 terkonfirmasi melalui korelasi bivariat ($r = 0,420$, $p < 0,001$) dan Ha2 terkonfirmasi dengan sangat kuat ($r = 0,755$; $b = 0,622$; $t = 12,820$; $p < 0,001$).

2. Besaran Pengaruh Otoritas Tokoh Keagamaan dalam Kampanye Publik terhadap Keputusan Memilih Santri sangat Besar dan Substansial

Rumusan masalah kedua dijawab melalui koefisien determinasi (R^2) dan koefisien regresi terstandarisasi. Model regresi linear berganda dengan dua prediktor (X1 dan X2) menghasilkan $R^2 = 0,579$, yang berarti 57,9% variasi dalam skor Keputusan Memilih Santri

dapat dijelaskan secara simultan oleh Otoritas Tokoh Keagamaan dan Kampanye Publik Tokoh Keagamaan. Nilai ini jauh melampaui ambang efek besar (large effect) menurut Cohen (1988) yang menetapkan $R^2 \geq 0,26$ sebagai batas efek besar, menempatkan penelitian ini dalam kategori efek yang sangat besar (very large effect) untuk ukuran penelitian dengan hanya dua prediktor di bidang ilmu sosial.

Ketika ketiga variabel moderating (Z1, Z2, Z3) diikutsertakan dalam model MRA, nilai R^2 meningkat secara drastis menjadi 0,72 artinya 72,9% variasi keputusan memilih santri dapat dijelaskan oleh model komprehensif ini. Peningkatan $\Delta R^2 = 0,150$ (15 poin persentase) ini bermakna bahwa faktor-faktor kontekstual dan kapasitas individual santri memberikan tambahan daya jelas yang sangat substantif. Secara keseluruhan, model ini mengkonfirmasi bahwa Ha3 diterima: X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y dengan daya jelas yang sangat besar ($R^2 = 0,579$, F simultan signifikan pada $p < 0,001$).

Kampanye publik (X2) adalah prediktor tunggal yang paling dominan dalam model, dengan koefisien beta terstandarisasi yang diperkirakan sebesar $\beta \approx 0,710$ termasuk kategori very large effect. Temuan ini secara substantif menegaskan bahwa dalam ekosistem pesantren di DIY, tindakan nyata kiai berupa kampanye politik secara terbuka merupakan determinan terkuat perilaku elektoral santri, melebihi faktor-faktor lain yang lazim diidentifikasi oleh teori-teori perilaku pemilih konvensional seperti identifikasi partai (Michigan Model) maupun pertimbangan program kandidat (Rational Choice Model).

3. Tiga Variabel Moderating Terbukti Memoderasi secara Parsial: Orientasi Pesantren Memperkuat, Literasi Media Digital dan Literasi Politik Memperlemah

Rumusan masalah ketiga dijawab melalui Moderated Regression Analysis (MRA) yang menguji enam interaksi. Dari enam interaksi tersebut, empat terbukti signifikan, sehingga Ha4 diterima secara parsial dengan rincian sebagai berikut.

Pertama, Orientasi Pesantren (Z2) memoderasi-perkuat pengaruh Otoritas Tokoh Keagamaan (X1) terhadap Keputusan Memilih (Y) dengan estimate = 0,079 ($Z = 3,710$, $p < 0,001$). Ini adalah efek moderasi terkuat yang ditemukan dalam penelitian ini. Maknanya: semakin tinggi orientasi politik aktif suatu pesantren, semakin besar pengaruh otoritas kiai terhadap keputusan memilih santrinya. Pesantren yang secara institusional aktif berpolitik berfungsi sebagai amplifier yang membesarkan pengaruh simbolik kiai melalui mekanisme tekanan normatif, identitas kelompok, dan konformitas institusional.

Kedua, Orientasi Pesantren (Z2) juga memoderasi-perkuat pengaruh Kampanye Publik (X2) terhadap Y dengan estimate = 0,034 ($Z = 2,390$, $p = 0,017$). Secara konsisten, lingkungan pesantren yang berorientasi politik aktif memperkuat seluruh jalur pengaruh kiai baik yang bersifat simbolik (X1) maupun yang bersifat komunikatif (X2).

Ketiga, Literasi Media Digital (Z3) memoderasi-perlemah pengaruh Kampanye Publik (X2) terhadap Y dengan estimate = -0,055 ($Z = -3,389$, $p < 0,001$). Ini merupakan temuan

dengan implikasi kebijakan terbesar: santri yang memiliki kemampuan literasi media digital tinggi secara signifikan lebih mampu menyaring pesan kampanye kiai yang disebarkan melalui platform digital, sehingga pengaruh kampanye tersebut terhadap keputusan memilih mereka jauh lebih lemah. Literasi media digital berfungsi sebagai perisai epistemis yang mendorong kemandirian elektoral santri.

Keempat, Literasi Politik (Z1) memoderasi-perlemah pengaruh Kampanye Publik (X2) terhadap Y dengan estimate = -0,031 ($Z = -1,980$, $p = 0,048$). Santri yang melek politik lebih resisten terhadap pesan kampanye kiai karena memiliki kerangka evaluatif yang lebih mandiri berbasis pengetahuan tentang sistem politik dan hak-hak demokratis sebagai pemilih.

Sementara itu, dua interaksi yang tidak signifikan $X1 \times Z1$ ($p = 0,679$) dan $X1 \times Z3$ ($p = 0,356$) memiliki makna yang tidak kalah penting: baik literasi politik maupun literasi media digital tidak mampu memoderasi pengaruh otoritas relasional kiai (X1) yang bekerja melalui jalur afektif, personal, dan tatap muka. Pengaruh simbolik kiai yang berakar dalam budaya ta'dzim dan internalisasi bertahun-tahun lebih resisten terhadap intervensi kapasitas kognitif individual dibandingkan pengaruh pesan-pesan kampanye digital yang lebih bersifat komunikatif dan diskursif.

4. Kesimpulan Sintesis: Model Kapital Simbolik-Kampanye-Konteks (KKK)

Secara integratif, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pengaruh tokoh keagamaan terhadap perilaku elektoral santri bekerja dalam tiga lapisan yang saling berinteraksi: (1) lapisan kapital simbolik, otoritas kiai sebagai modal dasar yang dibangun melalui relasi kultural dan religius bertahun-tahun; (2) lapisan konversi kampanye, mekanisme di mana kapital simbolik diinvestasikan ke dalam ranah elektoral melalui tindakan kampanye publik; dan (3) lapisan konteks moderasi, faktor institusional (orientasi pesantren) yang memperkuat, serta kapasitas individual (literasi politik dan media digital) yang memperlemah efektivitas konversi tersebut.

Model ini memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur perilaku elektoral di Indonesia dengan menunjukkan bahwa pengaruh kiai bukan entitas tunggal yang monolitik, melainkan konstruk yang kompleks dan kontekstual. Ia dapat diperkuat oleh lingkungan institusional dan diperlemah oleh pemberdayaan kapasitas kritis individu santri yang merupakan sebuah temuan yang sekaligus membuka ruang optimisme tentang prospek kemandirian elektoral santri di masa depan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut dikemukakan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan untuk menindaklanjuti temuan penelitian ini. Saran-saran ini dirumuskan secara operasional dan kontekstual, merujuk langsung pada temuan empiris serta implikasi teoritis yang telah diuraikan dalam pembahasan.

1) Saran bagi Pengelola dan Pimpinan Pondok Pesantren

Temuan bahwa Orientasi Pesantren (Z2) merupakan moderator terkuat yang memperkuat pengaruh kiai ($X1 \times Z2: p < 0,001$ dan $X2 \times Z2: p = 0,017$) menyiratkan tanggung jawab institusional yang besar bagi pengelola pesantren. Semakin terang orientasi politik aktif suatu pesantren, semakin besar kemungkinan santri kehilangan otonomi elektoral pribadinya. Oleh karena itu, pesantren perlu mempertimbangkan beberapa langkah berikut.

Pertama, pesantren disarankan untuk merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan internal tentang netralitas institusional dalam pemilu kepada seluruh jajaran, kiai, ustadz, pengurus, dan senior santri. Kebijakan ini bukan berarti melarang kiai berpendapat secara pribadi, melainkan mendorong agar pesantren sebagai lembaga tidak menjadi kendaraan kampanye partisan yang dapat mengorbankan otonomi pilihan santri. Dalam perspektif fiqh siyasah Islam, hal ini sejalan dengan prinsip 'adam al-ikrah (ketiadaan paksaan) dalam pengambilan keputusan.

Kedua, pesantren sangat disarankan untuk mengintegrasikan program Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pesantren (PKBP) ke dalam kurikulum formal maupun kegiatan pengembangan diri santri. Program ini idealnya dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah seperti prinsip syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), dan masalah mursalah (kemaslahatan umum) dengan konten pendidikan demokrasi yang kontekstual. Pendekatan berbasis nilai Islam ini terbukti lebih efektif dan lebih diterima dibandingkan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang bersifat sekuler-generik.

Ketiga, pesantren perlu menyediakan ruang dan forum yang aman bagi santri untuk berdiskusi tentang pilihan politik secara terbuka dan tanpa tekanan. Forum seperti halaqah siyasah (lingkar kajian politik) atau diskusi mahad tentang isu-isu pemilu dapat menjadi sarana bagi santri untuk mengembangkan kapasitas deliberatif dan otonomi politiknya secara gradual, dalam koridor nilai-nilai pesantren yang tetap dijunjung tinggi.

2) Saran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY

Besarnya pengaruh kampanye publik kiai terhadap keputusan memilih santri ($b = 0,622$, $R^2 = 0,579$) seharusnya mendorong lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap komunitas pesantren.

Pertama, KPU DIY disarankan untuk merancang program sosialisasi Pemilu Sadar Santri yang spesifik dan kontekstual. Program ini berbeda dari sosialisasi pemilu umum dalam hal konten, pendekatan, dan saluran distribusi: konten harus mengintegrasikan narasi keagamaan tentang amanah suara sebagai ibadah demokratis; pendekatan menggunakan tokoh-tokoh muda pesantren (santri senior, alumni) sebagai agen sosialisasi sebaya yang lebih efektif; dan saluran distribusi memanfaatkan platform media sosial yang lazim digunakan santri (WhatsApp, Instagram, TikTok pesantren).

Kedua, Bawaslu DIY disarankan untuk mengembangkan protokol pengawasan yang lebih sensitif terhadap dinamika pengaruh keagamaan dalam pemilu, khususnya dalam

mengidentifikasi batas antara hak kiai sebagai warga negara untuk berpendapat politik dan potensi pemanfaatan fasilitas atau kapasitas institusional pesantren untuk kampanye partisan yang melanggar Peraturan KPU. Protokol ini perlu dirumuskan melalui dialog inklusif dengan komunitas pesantren untuk menghindari kesan konfrontatif.

Ketiga, KPU dan Bawaslu disarankan berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk menyusun panduan etika politik bagi tokoh agama yang dirumuskan dari dalam tradisi Islam itu sendiri. Merujuk pada fatwa-fatwa ulama tentang netralitas dakwah dari kepentingan partisan sehingga panduan tersebut memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di mata komunitas pesantren. Pendekatan 'regulation from within' (regulasi dari dalam komunitas) ini terbukti lebih efektif untuk komunitas yang memiliki tingkat homogenitas normatif yang tinggi.

3) Saran bagi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan

Temuan bahwa Literasi Media Digital (Z3) merupakan moderator pelemah pengaruh kampanye kiai yang paling kuat (estimate = -0,055, $Z = -3,389$, $p < 0,001$) menegaskan urgensi intervensi kebijakan di bidang literasi digital dalam konteks pesantren. Pertama, Kementerian Agama disarankan untuk mengembangkan Kurikulum Literasi Digital Berbasis Pesantren (KLDBP) yang dapat diintegrasikan ke dalam program Ma'had Aly, Madrasah Diniyah, dan program pendidikan formal di bawah naungan pesantren. Kurikulum ini secara khusus menekankan kemampuan kritis dalam mengonsumsi konten politik di media digital: kemampuan fact-checking, deteksi hoaks, analisis bias sumber, dan pemahaman tentang algoritma media sosial yang cenderung menciptakan echo chamber. Konten-konten ini perlu dikemas dalam bahasa dan contoh yang relevan dengan keseharian santri bukan dengan contoh abstrak dari dunia barat.

Kedua, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren disarankan untuk mengembangkan program Santri Melek Pemilu sebagai program nasional yang dilaksanakan menjelang setiap pemilu. Program ini menggabungkan pelatihan literasi digital, literasi politik, dan simulasi pemilu berbasis nilai Islam, dengan melibatkan alumni pesantren yang aktif di dunia politik sebagai narasumber inspiratif yang relevan bagi santri. Ketiga, Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disarankan untuk mendorong penelitian-penelitian lanjutan tentang pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pesantren, mengingat kesenjangan signifikan antara luasnya komunitas pesantren (diperkirakan lebih dari 4 juta santri aktif di seluruh Indonesia) dan minimnya penelitian akademis berbasis data tentang pola partisipasi politik mereka.

4) Saran bagi Partai Politik dan Tim Sukses Kandidat

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi strategi komunikasi politik partai dan kandidat yang ingin memenangkan suara di daerah-daerah dengan konsentrasi pesantren yang tinggi, seperti DIY dan berbagai daerah di Jawa, Madura, dan Sulawesi. Pertama, besarnya pengaruh kampanye publik kiai ($b = 0,622$) mengkonfirmasi bahwa endorsement atau

dukungan terbuka dari kiai merupakan strategi kampanye yang sangat efektif di komunitas pesantren. Namun, strategi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan menghormati norma-norma komunitas pesantren: pendekatan yang bersifat transaksional, terburu-buru, atau tidak didasari oleh relasi kepercayaan yang otentik justru berpotensi berbalik menimbulkan resistensi. Kiai sangat sensitif terhadap kesan 'dibeli', dan reputasi pesantren adalah modal simbolik yang tidak dapat dikompromikan. Kedua, partai politik disarankan untuk berinvestasi dalam program jangka panjang pengembangan kader dari kalangan alumni pesantren sebagai jembatan yang legitim antara dunia politik formal dan komunitas pesantren. Kader yang memiliki latar belakang pesantren memiliki kapital sosial dan budaya yang tidak dapat dimiliki oleh politisi tanpa latar belakang tersebut, dan kehadirannya dalam struktur partai memberikan sinyal kepercayaan yang jauh lebih organik bagi komunitas pesantren.

Ketiga, mengingat temuan bahwa literasi media digital santri yang tinggi melemahkan efek kampanye digital (estimate = -0,055, $p < 0,001$), tim komunikasi digital kandidat perlu merancang konten yang lebih substantif, berbasis fakta, dan relevan dengan kepentingan komunitas pesantren bukan sekadar konten propaganda atau disinformasi yang mudah ditelanjangi oleh santri yang melek digital. Konten yang berkualitas dan jujur justru lebih tahan uji di hadapan audiens pesantren yang semakin kritis.

5) Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang relevan dan penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik di komunitas pesantren Indonesia. Karena negara demokrasi, maka masyarakatnya dituntut untuk faham dan mengerti politik. maka dari itu, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: Pertama, penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain longitudinal yang mana itu digunakan untuk mengukur preferensi memilih santri sebelum, selama, dan setelah masa kampanye untuk membangun klaim kausalitas temporal yang lebih kuat. Desain cross-sectional yang digunakan dalam penelitian ini, meskipun valid untuk mendeteksi hubungan dan moderasi, belum dapat membuktikan arah kausalitas secara definitif. Kedua, penelitian ini menggunakan hanya 3 butir untuk mengukur variabel moderating Z1, Z2, dan Z3. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif dengan setidaknya 8-12 butir per variabel moderating, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan behavioral dari literasi politik maupun literasi media digital, serta dimensi formal dan informal dari orientasi pesantren. Ketiga, cakupan geografis penelitian ini terbatas pada DIY. Penelitian komparatif yang melibatkan pesantren dari berbagai provinsi khususnya membandingkan DIY (pesantren NU-sentris), Jawa Barat (pesantren dengan keragaman afiliasi), Madura (pesantren kultural kuat), dan Sulawesi (pesantren di luar Jawa) akan memberikan gambaran yang jauh lebih kaya tentang variabilitas pengaruh kiai lintas konteks budaya dan kelembagaan. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner. Untuk memperdalam pemahaman

tentang mekanisme psikologis dan kultural yang mendasari temuan-temuan kuantitatif ini, sangat disarankan untuk melakukan studi mixed-methods yang menggabungkan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam (in-depth interviews) kepada santri, kiai, dan pengurus pesantren, serta observasi etnografis selama periode kampanye pemilu.

Kelima, penelitian ini difokuskan pada sisi santri sebagai penerima pengaruh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi sisi kiai sebagai agen pengaruh: motivasi kiai dalam mengambil posisi elektoral, pertimbangan fiqh siyasah yang mendasari keputusan endorsement, dan dampak keterlibatan politik kiai terhadap integritas dan kredibilitas pesantren dalam jangka panjang. Penelitian dari perspektif kiai ini akan melengkapi narasi yang sudah dibangun dari perspektif santri dalam penelitian ini. Keenam, mengingat kontribusi model MRA yang mencapai $R^2 = 0,729$ dengan menambahkan variabel moderating, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel moderating potensial lain yang belum dimasukkan dalam model ini, seperti: tingkat pendidikan formal santri, durasi tinggal di pesantren, jenis kelamin, status ekonomi keluarga, dan tingkat paparan terhadap media mainstream (televisi, koran) sebagai pembanding terhadap paparan media digital.

Tabel 5.1 Rekap Kesimpulan dan Saran Berdasarkan Temuan Penelitian

Rumusan Masalah	Temuan Utama	Dasar Statistik	Implikasi / Saran
RM-1: Apakah terdapat pengaruh?	Ya. Terdapat pengaruh signifikan $X1 \rightarrow Y$ dan $X2 \rightarrow Y$. $X2$ sebagai prediktor dominan; $X1$ bekerja secara dimediasi oleh $X2$.	$r_{X1-Y} = 0,420^{***}$; $r_{X2-Y} = 0,755^{***}$; $b_{X2} = 0,622$ ($t=12,82$, $p<0,001$)	Pesantren perlu menyadari posisi kiai sebagai aktor elektoral yang kuat; KPU perlu sosialisasi khusus santri.
RM-2: Seberapa besar pengaruh?	Sangat besar. 57,9% variasi Y dijelaskan oleh $X1+X2$; meningkat ke 72,9% dengan variabel moderating.	$R^2=0,579$ (model dasar); $R^2=0,729$ (MRA); F simultan $p<0,001$	Pengaruh kiai termasuk very large effect (Cohen, 1988); melebihi rata-rata penelitian perilaku pemilih.
RM-3: Faktor moderasi?	$Z2$ (Orientasi Pesantren) \rightarrow MEMPERKUAT. $Z3$ (Lit. Media Digital) dan $Z1$ (Lit. Politik) \rightarrow MEMPERLEMAH. 4/6 interaksi signifikan.	$X1 \times Z2$: $est=0,079^{***}$; $X2 \times Z3$: $est=-0,055^{***}$; $X2 \times Z2$: $est=0,034^*$; $X2 \times Z1$: $est=-0,031^*$	Prioritas: (1) tingkatkan literasi digital santri; (2) dorong netralitas institusional pesantren; (3) kembangkan literasi

			politik berbasis nilai Islam.
--	--	--	-------------------------------

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2026. *** $p < 0,001$; * $p < 0,05$

3. Kata Penutup

Penelitian ini hadir dalam konteks yang sangat relevan: Pemilu 2024 yang berlangsung di tengah transformasi digital yang pesat, dinamika politik identitas yang intensif, dan kebangkitan peran pesantren sebagai aktor sosial-politik yang semakin diperhitungkan dalam peta demokrasi Indonesia. Temuan-temuan yang dihasilkan bahwa pengaruh kiai sangat besar namun dapat dimoderasi oleh kapasitas kritis santri menyampaikan pesan yang seimbang: pesantren adalah entitas yang kaya dengan modal sosial dan moral, dan modal tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan sekadar menjadi instrumen kepentingan elektoral jangka pendek.

Islam dan demokrasi tidak berada dalam posisi diametral-oposisional. Tradisi syura dalam Islam mengandung nilai-nilai deliberasi dan pertimbangan kolektif yang secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif (Habermas, 1996). Yang dibutuhkan adalah terjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemilu yang konkret: santri yang memilih dengan penuh pertimbangan, kiai yang menggunakan otoritasnya untuk memberdayakan bukan mendikte, dan pesantren yang menjadi laboratorium demokrasi berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Peneliti berharap bahwa temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi kontribusi kecil namun bermakna bagi tiga komunitas: komunitas akademis yang terus berupaya memahami kompleksitas demokrasi Indonesia; komunitas pesantren yang berjuang menjaga relevansi dan integritas lembaganya dalam dinamika politik modern; dan komunitas penyelenggara pemilu yang bekerja keras mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil termasuk bagi 4 juta lebih santri yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Farid and Baktiawan Nusanto, “PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPENGARUHI AFILIASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO)”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 4, 2025, pp. 61–70 [<https://doi.org/10.9963/kjjzb76>].
- Abdulloh Hamid et al., “Literasi Digital Santri Milenial: Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Jihadul Chakim Mojokerto”, *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 19, no. 1, 2024, pp. 89–100 [<https://doi.org/10.19105/tjpi.v19i1.9920>].
- Aiken, Leona S., Stephen G. West, and Raymond R. Reno, *Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions*, SAGE, 1991.
- “Anies-Cak Imin Kunjungi Ponpes di Kabupaten Malang, Temui Kyai dan Santri”, *Kompas.tv*, <https://www.kompas.tv/regional/450587/anies-cak-imin-kunjungi-ponpes-di-kabupaten-malang-temui-kyai-dan-santri>, accessed 18 May 2026.
- Anwar, Khoirul, “Peran Kiai dalam pemilihan calon pasangan bagi Santri berdasarkan konsep takzim perspektif teori struktural fungsional: Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darusalam Kepanjen Kabupaten Malang”, masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, <https://etheses.uin-malang.ac.id/10023/>, accessed 28 May 2026.
- Aspinall, Edward, “Voter Behavior in Indonesia Since Democratization: Critical Democrats. By Saiful Mujani, R. William Liddle, and Kuskridho Ambardi. New York: Cambridge University Press, 2018. 286p. \$99.99 cloth.”, *Perspectives on Politics*, vol. 17, no. 02, 2019, pp. 595–7 [<https://doi.org/10.1017/S1537592719000306>].
- Aspinall, Edward and Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election]*, vol. 1, Yogyakarta, Indonesia: Research Centre for Politics and Government, 2015.
- Baron, Reuben M. and David A. Kenny, “The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations”, *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 51, no. 6, US: American Psychological Association, 1986, pp. 1173–82 [<https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>].
- Bashori, Khoiruddin, “Pendidikan Politik di Era Disrupsi”, *SUKMA: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 287–310 [<https://doi.org/10.32533/02207.2018>].
- Blumler, Jay G. and Elihu Katz, *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research*, SAGE Publications, 1974.
- Bourdieu, Pierre, *Language and Symbolic Power*, Harvard University Press, 1991.
- , *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*, Columbia University Press, 1993.
- Braunstein, Ruth, Todd Nicholas Fuist, and Rhys H. Williams, *Religion and Progressive Activism: New Stories About Faith and Politics*, NYU Press, 2017.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Mizan, 1995.

- Campbell, Angus and University of Michigan Survey Research Center, *The American Voter*, University of Chicago Press, 1980.
- Cassel, Carol A. and Celia C. Lo, “Theories of Political Literacy”, *Political Behavior*, vol. 19, no. 4, 1997, pp. 317–35 [<https://doi.org/10.1023/A:1024895721905>].
- Cohen, Jacob, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, Routledge, 2013.
- Dahl, Robert A., *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, 2008.
- detikcom, Tim, “Santri dan Alumni Ponpes Se-Jatim Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud”, *detiknews*, <https://news.detik.com/pemilu/d-7172706/santri-dan-alumni-ponpes-se-jatim-deklarasi-dukung-ganjar-mahfud>, accessed 18 May 2026.
- developer, mediaindonesia com, *Prabowo Sowan Ke 9 Kiai Sepuh NU Jateng, M Qodari Game Changer di Pilpres 2024*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/525256/prabowo-sowan-ke-9-kiai-sepuh-nu-jateng-m-qodari-game-changer-di-pilpres-2024>, accessed 18 May 2026.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*, LP3ES, 2011.
- DiMaggio, Paul and Walter Powell, “The Iron Cage Revisited: Isomorphism in Organizational Fields”, *American Sociological Review*, vol. 48, 2000, pp. 147–60 [<https://doi.org/10.2307/2095101>].
- Djupe, Paul A. and Christopher P. Gilbert, *The Political Influence of Churches*, Cambridge University Press, 2009.
- Downs, Anthony, *An Economic Theory of Democracy*, 1957.
- Epley, Dr Jennifer L., *Weber’s Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics*, vol. 5, no. 7, 2015.
- Ernas, Saidin, “Bias Politik Pesantren: Dari Pragmatisme-Transaksional Hingga Resistensi Sosial”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2011 [<https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0005>].
- , *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta*.
- Ernas, Saidin and Ferry Muhammadsyah Siregar, “Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di YOGYAKARTA”, *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 25, no. 2, 2010, p. 37094.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967*, Lkis Pelangi Aksara, 2012.
- Fealy, Greg and Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Fossati, Diego, “What Drives Voting Behavior in Southeast Asia? Evidence from Candidate Choice Experiments in Five Countries”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol. 44, no. 3, SAGE Publications Ltd, 2025, pp. 436–60 [<https://doi.org/10.1177/18681034251334253>].
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, University of Chicago Press, 1976.
- Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Polity Press, 1997.

- Hafid, Hafid, Siti Raudhatul Jannah, and Minan Jauhari, “Strategi Komunikasi Politik ‘Nyantri’ Prabowo Subianto dalam Memenangkan Pilpres 2024”, *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 262–77 [<https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1041>].
- , “Strategi Komunikasi Politik ‘Nyantri’ Prabowo Subianto dalam Memenangkan Pilpres 2024”, *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 262–77 [<https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1041>].
- Hair, Joseph F. et al., *Multivariate Data Analysis*, Cengage Learning, 2022.
- Heilbroner, Robert L. et al., *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Prentice-Hall, 1980.
- Hobbs, Renee, *Digital and media literacy: a plan of action : a white paper on the digital and media literacy recommendations of the Knight Commission on the information needs of communities in a democracy*, Washington, D.C.: Aspen Institute, 2010.
- Horikoshi, Hiroko, “A Traditional Leader in A Time of Change: The ‘Kijaji’ and ‘Ulama’ in West Java”, text, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976, <https://hdl.handle.net/2142/67549>, accessed 28 May 2026.
- Iyengar, Shanto and Donald R. Kinder, *News That Matters: Television and American Opinion*, University of Chicago Press, 1987.
- Jelen, Ted Gerard and Clyde Wilcox, *Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, The Few, and The Many*, Cambridge University Press, 2002.
- Kahneman, Daniel, *Thinking, Fast and Slow (Cover Baru)*, Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Kellerman, Barbara (ed.), *Political Leadership: A Source Book*, University of Pittsburgh Press, 1986 [<https://doi.org/10.2307/jj.12381759>].
- Kellner, Douglas and Jeff Share, “Toward Critical Media Literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy”, *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, vol. 26, no. 3, Routledge, 2005, pp. 369–86 [<https://doi.org/10.1080/01596300500200169>].
- Kelman, Herbert C., “Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change”, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 2, no. 1, SAGE Publications Inc, 1958, pp. 51–60 [<https://doi.org/10.1177/002200275800200106>].
- “KPU DIY - ARSIP PEMILU”, *KPU DIY - ARSIP PEMILU*, 26 May 2026, <https://diy.kpu.go.id/page/read/arsip-pemilu>, accessed 28 May 2026.
- Kurniawati, Meike, *Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap Perilaku Memilih para Pemilih Pemula*.
- Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson, and Hazel Gaudet, *The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*, Columbia University Press, 1948.
- Liddle, R. William and Saiful Mujani, “Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia”, *Comparative Political Studies*, vol. 40, no. 7, SAGE Publications Inc, 2007, pp. 832–57 [<https://doi.org/10.1177/0010414006292113>].

- , "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia", *Comparative Political Studies*, vol. 40, no. 7, SAGE Publications Inc, 2007, pp. 832–57 [https://doi.org/10.1177/0010414006292113].
- Likert, Rensis, *A Technique for the Measurement of Attitudes*, Columbia university, 1932.
- Madani, Camilla Yssam and Kacung Marijan, *PENGARUH KIAI TERHADAP PERILAKU MEMILIH ALUMNI SANTRI PONDOK PESANTREN MBI AMANATUL UMMAH PACET ANGKATAN 2017 PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019*, vol. 7, no. 1.
- Mahali, Masruri, Wawan Sobari, and George Towar Ikbal Tawwakal, "Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics: A Critical Point of View", *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 75–89 [https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.75-89].
- Mubarok, Husni, "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 11, no. 2, 2018, pp. 365–400 [https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57].
- Muharrom, Dede Imam, Karim Suryadi, and Sri Wahyuni Tanszil, "Pemahaman Agama dan Partisipasi Politik Santri: Studi Korelasional di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, Tasikmalaya", *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, vol. 5, no. 3, 2025, pp. 79–88 [https://doi.org/10.56393/antropocene.v5i3.3423].
- Mujani, Saiful, *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mukhlisin, Mukhlisin et al., "URGENSI LITERASI DIGITAL BAGI SANTRI MILENIAL DI PONDOK PESANTREN RAHMATUTTHOYIBAH AL IFLAHAH GUNUNG KALER TANGERANG", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 208–14 [https://doi.org/10.32493/jpka.v1i2.9672].
- NAJMI, NUR, "PENGARUH PERILAKU POLITIK KIAI PESANTREN MIFTAHUL HUDA MANONJAYA TERHADAP PERILAKU MEMILIH SANTRI PADA PILPRES 2024", other, Universitas Siliwangi, 2024 [https://doi.org/10/BAB%2520I.pdf].
- Nimmo, Dan D., *Komunikasi politik: komunikator, pesan dan media*, Remadja Karya, 1989.
- Norris, Pippa and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cambridge University Press, 2011.
- Pradana, Mahatva Yoga Adi, "RELASI SOSIAL ELIT POLITIK DAN SESEPUH DESA MELALUI LANGGAR DI KABUPATEN MALANG", *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 181–206 [https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-07].
- Putnam, Robert D., *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon and Schuster, 2000.
- Rahmawati, Restu et al., "Penguatan Literasi Politik bagi Santri melalui Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan Digital di Pesantren Musyidul Falah 2 Purwakarta", *Jurnal SOLMA*, vol. 14, no. 3, 2025, pp. 4793–807 [https://doi.org/10.22236/solma.v14i3.20973].
- Rawls, John, *Political Liberalism*, Columbia University Press, 1993.
- Ricklefs, Merle Calvin, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, Penerbit Serambi, 2008.

- Rizqya, Fatikhatur and Nadya Afdholy, “Nderek Kiai: Santri dalam Ideologi Politik Indonesia 2024: Nderek Kiai: Santri in 2024 Indonesian Political Ideology”, *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 15, no. 2, 2024, pp. 230–41 [<https://doi.org/10.31503/madah.v15i2.820>].
- Rozaq, Arif Khairur, “Kepemimpinan Kiai dalam Menguatkan Sikap Moderasi Santri: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Khoirot Karangsono Pagelaran Malang”, masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, <https://etheses.uin-malang.ac.id/39008/>, accessed 9 Dec 2025.
- Sari, Resti Tultuffia et al., “OTORITAS DAN FEODALISME DALAM TRADISI PESANTREN INDONESIA: SEBUAH KAJIAN INTERDISIPLINER TENTANG KEKUASAAN, PENGETAHUAN, DAN MODAL KEAGAMAAN”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 4, 2025.
- Setiawan, Eko, “EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri”, *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, vol. 13, no. 2, 2012, pp. 137–52 [<https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>].
- Short, John, Ederyn Williams, and Bruce Christie, *The Social Psychology of Telecommunications*, Wiley, 1976.
- Sihono - - and Fitriyah - -, “Santri, Kyai, dan Pesantren (Studi Kasus: Kemenangan Pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2018)”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 9, no. 04, 2020, pp. 175–84.
- Sinarsari, Laura Annisa and Muhammad Ghulam Adnan, “PERAN KIAI DALAM MOBILISASI POLITIK MELALUI JARINGAN KIAI SANTRI NASIONAL (JKSN) JAWA TIMUR PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 2, 2025, pp. 884–904.
- Sipa, Amar Muhyi Dinis, Hopizal Wadi, and Fahrurrazi Fahrurrazi, “Religion and Politics: Symbolization of Religion in the contestation of legislative elections 2019”, *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 38–43 [<https://doi.org/10.30984/kijms.v2i2.63>].
- Smidt, Corwin E., *Pulpit and Politics: Clergy in American Politics at the Advent of the Millennium*, Baylor University Press, 2004.
- Sugiyono, Prof, “Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”, *Alfabeta, Bandung*, vol. 62, 2011, p. 70.
- Sumantri, Imam, “Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul”, *Journal of Political Issues*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 134–42 [<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>].
- Suprayogo, Imam, *Kyai dan politik: membaca citra politik kyai*, UIN-Malang Press, 2009.
- Susanto Susanto, Emy Hajar Abra, and Alwan Hadiyanto, “Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia”, *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, 2025, pp. 1506–18 [<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>].
- Trepte, Sabine, *Social Identity Theory*, 2006, pp. 255–72.
- Turner, Phil, “Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools”, *Teaching Public Administration*, vol. 19, no. 2, 1999, pp. 46–9 [<https://doi.org/10.1177/014473949901900204>].

- “UU No. 7 Tahun 2017”, *Database Peraturan / JDIH BPK*, <http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, accessed 28 May 2026.
- “UU No. 13 Tahun 2012”, *Database Peraturan / JDIH BPK*, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>, accessed 28 May 2026.
- Vitale, Denise, “Between deliberative and participatory democracy: A contribution on Habermas”, *Philosophy & Social Criticism*, vol. 32, no. 6, SAGE Publications Ltd, 2006, pp. 739–66 [<https://doi.org/10.1177/0191453706064022>].
- Warburton, Eve and Edward Aspinall, “Explaining Indonesia’s democratic regression: Structure, agency and popular opinion”, *Contemporary Southeast Asia*, vol. 41, no. 2, 2019, pp. 255–85 [<https://doi.org/10.1355/cs41-2k>].
- Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Univ of California Press, 1978.
- , *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Univ of California Press, 1978.
- Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DI, *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2023*, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/026aad493ec54b735d608483/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2023.html>, accessed 28 May 2026.
- Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota, *DAFTAR PONDOK PESANTREN SE-KOTA YOGYAKARTA*, <https://ppid.kemenagkotajogja.id>, accessed 28 May 2026.
- Yunus, Firdaus M., Taslim HM Yasin, and Syamsul Rijal, “Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 121–37 [<https://doi.org/10.29103/jsds.v9i2.12590>].
- Zahro, Fatimatuz and Fenolia Intan Saputri, “Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024”, *Manabia: Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 01, 2024, pp. 21–36 [<https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8663>].
- Zajonc, R.B., “Feeling and thinking: Preferences need no inferences”, *American Psychologist*, vol. 35, no. 2, US: American Psychological Association, 1980, pp. 151–75 [<https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.2.151>].
- Zuliansyah, MAlfien, “Sowan Kyai, Strategi dalam Budaya Komunikasi Politik di Indonesia”, 2015, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/121414>.